



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH



LKjIP 2021

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

(0274) 866039



bkad@slemankab.go.id



bkad.slemankab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan “**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah 2021**”.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sebagai salah satu entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Sleman sudah barang tentu wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah 2021 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan di masa datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di masa datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Sleman,
Kepala BKAD Kab Sleman

Haris Sutarta, SE., M.T
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19640831 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Maksud dan Tujuan Laporan 1

 1.2. Tugas Organisasi 1

 1.3. Permasalahan dan Tantangan 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 7

 2.1. Rencana Strategis (Renstra)..... 7

 2.2. Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD 2021 9

 2.3. Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD 2021 10

 2.4. Indikator Kinerja Utama 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13

 3.1. Capaian Kinerja Organisasi 13

 3.2. Pengukuran Capaian Indikator Kegiatan 38

 3.4. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan 40

BAB IV PENUTUP 48

LAMPIRAN 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Seminar dan Workshop Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik, Aktivasi Akun AMS dan Penerbitan Sertifikat Elektronik	20
Gambar 3.2 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2020	22
Gambar 3.3 Sosialisasi kepada Wajib Pajak Daerah	28
Gambar 3.4 Loker SPTPD Online Kantor BKAD Kabupaten Sleman	30
Gambar 3.5 Pemasangan Tapping Device di salah satu Restoran di Mall	31
Gambar 3.6 Pemberian Penghargaan Panutan Pembayaran Pajak PBB P2	32
Gambar 3.7 Penyampaian SPPT PBB P2 ke Kalurahan	33
Gambar 3.8 Kerjasama dengan Instansi Vertikal dalam rangka Penegakan Peraturan	34

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kategori Capaian	14
Tabel 3.2	Indikator Sasaran 1	15
Tabel 3.3	Indikator Sasaran 2	16
Tabel 3.4	Indikator Sasaran 3	18
Tabel 3.5	Indikator Sasaran 4	26
Tabel 3.6	Jumlah Padukahan, Kalurahan dan Kecamatan Lunas Tahun 2017 sampai dengan 2021	33
Tabel 3.7	Indikator Sasaran 5	35
Tabel 3.8	Indikator Sasaran 6	37
Tabel 3.9	Rincian Belanja Langsung BKAD TA 2021	41
Tabel 3.10	Rincian Belanja Langsung UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal TA 2021	46
Tabel 3.11	Rincian Belanja Langsung UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo TA 2021	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Laporan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BKAD sebagai instansi pemerintah dengan mendasarkan pada suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Secara ringkas maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja
3. Sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan di masa datang
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di masa datang
5. Sebagai bahan penyempurnaan kebijakan yang diperlukan

1.2. Tugas Organisasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai kedudukan strategis dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

BKAD sebagai Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang disisi lain BKAD juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dimana kepala SKPKD mendapat limpahan kuasa pengelolaan keuangan daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dari pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yaitu Bupati Sleman.

Tugas dan fungsi BKAD selaku SKPD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 28.2 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun tugas PPKD diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tugas PPKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Melakukan pengendalian atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
7. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kewenangan PPKD sebagai BUD adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
2. Mengesahkan DPA-SKPD
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah
6. Mengusahkan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
7. Melakukan pengendalian dan validasi atas bukti pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh SKPD

8. Menyimpan dan mengelola uang/kas daerah
9. Menetapkan SPD
10. Melakukan pembayaran atas beban rekening kas daerah berdasarkan permintaan pengguna anggaran
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
12. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
13. Menyajikan informasi keuangan daerah
14. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

1.3. Permasalahan dan Tantangan

Mayoritas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2021 dan pada tahun anggaran sebelumnya dapat dikatakan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD sebagai SKPKD/PPKD bahkan kegiatan kesekretariatanpun dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi BKAD sebagai SKPKD/PPKD. Berdasarkan pengalaman saat ini dan masa lalu permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD diantaranya :

1. Sistem informasi dari pemerintah pusat dibangun secara bertumbuh sehingga dalam perjalanannya perlu upaya pendampingan pada setiap tahapannya. Hal ini juga menjadikan kekhawatiran terhadap sistem terkait tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu tahapan rencana umum pengadaan, tahap penatausahaan dan tahapan pelaporan. Penyesuaian terhadap sistem baru ini membutuhkan upaya besar untuk dapat mengaplikasikannya dengan kemungkinan resiko yang menyertai, diantaranya adalah resiko lebih lambatnya waktu yang dicapai serta validitas data yang tersaji.
2. Adanya pandemic covid 19 yang telah berimbas pada penerimaan PAD diperlukan upaya yang intensif untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan perangkat daerah terkait sehingga penerimaan PAD mencapai target yang diharapkan.
3. Adanya peraturan baru tentang pengelolaan barang milik daerah diperlukan upaya untuk menginternalisasi peraturan tersebut kepada perangkat daerah agar terdapat keseragaman administrasi pengelolaan barang milik daerah antar perangkat daerah.

4. Adanya Kebijakan desentralisasi pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong pemenuhan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka memperlancar jalannya pemerintahan. Hal ini tentu saja harus diimbangi dengan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan dokumen penyusunan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah secara tertib. Periodisasi penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah harus diatur secara tepat sehingga TAPD memiliki waktu yang cukup untuk menyusun prioritas kebutuhan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
5. Realisasi fisik dan keuangan beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai rencana dan terakumulasi di akhir tahun anggaran serta penyerapan anggaran kurang dapat berjalan optimal. Dengan adanya kebijakan penyerapan anggaran yang dikaitkan dengan tunjangan penghasilan pegawai dapat mendorong masing-masing koordinator kegiatan untuk menepati jadwal penyerapan sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
6. Kapasitas dan kapabilitas pegawai dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sepenuhnya berbasis akrual serta dalam hal pengelolaan keuangan dan asset masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan dan asset.
7. Perencanaan program dan kegiatan belum menggunakan data/informasi yang akurat sebagai dasar penentuan kebutuhan dimasa datang.
8. Program dan kegiatan belum semuanya didukung dengan SOP sehingga berpotensi menimbulkan masalah pengendalian.
9. Tuntutan peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun instansi lain mengharuskan Badan keuangan dan Aset Daerah senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan baik layanan kepada wajib pajak maupun layanan kepada perangkat daerah secara terus menerus.

10. Beberapa regulasi yang menjadi acuan teknis detail pengelolaan keuangan dan aset, sangat dinamis, seringkali pemerintah Kabupaten Sleman kesulitan dalam penyesuaianannya
11. Inkompetensi secara teknologi, karena kesuksesan pengembangan sistem informasi tidak hanya bergantung pada penggunaan alat atau teknologinya saja, tetapi juga manusia sebagai perancang dan penggunaanya.

Secara umum tantangan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah berkenaan dengan tugas dan fungsi adalah:

1. Adanya Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 menjadi tugas BKAD untuk mengawal implementasi atas peraturan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Perubahan yang cukup signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah membutuhkan sumber daya besar untuk melaksanakannya
2. Adanya sistem informasi baru dari pemerintah pusat yang harus diikuti pemerintah daerah menuntut tingkat kedisiplinan yang tinggi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan mengingat server dikendalikan dari pemerintah pusat dan akses digunakan oleh seluruh daerah
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyangkut aspek kapabilitas, integritas dan profesionalitas serta memiliki tingkat kepedulian untuk melayani publik. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keuangan dan aset yang efektif dan efisien
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan baik *software* maupun *hardware* hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi

5. Proses ketatalaksanaan kelembagaan yang harus sesuai dengan regulasi di berbagai tingkatan baik regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun turunannya di daerah. Proses pengelolaan keuangan dan aset yang sesuai dengan regulasi akan menghasilkan produk yang berkualitas dan terhindar dari risiko penyimpangan aspek legal.
6. Tuntutan peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun instansi lain mengharuskan Badan keuangan dan Aset Daerah senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan terus menerus.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan Kinerja merupakan serangkaian proses yang menghubungkan antara Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perangkat daerah. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah paling tidak terdapat tiga tahapan perencanaan yang harus terpenuhi tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah adalah perencanaan strategis agar mampu menjawab tuntutan strategis lokal, nasional maupun global dengan tetap berada pada tatanan sistem perencanaan.

Pada tahap ini dipastikan bahwa Rencana Strategis paling tidak harus memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi. Melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi terutama dalam kurun waktu 2021-2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman.

2.1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah.

“TERWUJUDNYA SLEMAN SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG CERDAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI PERBEDAAN DAN MEMILIKI JIWA GOTONG ROYONG”

2.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi harus jelas dan sesuai tugas pokok

dan fungsi karena misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi juga membawa organisasi kepada suatu fokus, menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Dari 5 (lima) misi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman yang dapat dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah:

Misi 1 :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan untuk jangka waktu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sejalan dengan visi dan misi tujuan BKAD Kabupaten Sleman yang telah dirumuskan adalah:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah
- b) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.1.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasarannya adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- b) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.1.5. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan kebijakan dan program-program. Adapun strategi-strategi tersebut adalah :

- a) Meningkatkan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKAD
- b) Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan BKAD)

- c) Mengoptimalkan teknologi informasi dan social media untuk meningkatkan pelayanan BKAD
- d) Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- e) Meningkatkan pelayanan kesekretariatan
- f) Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan prima di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- g) Meningkatkan tatakelola proses penyusunan APBD
- h) Meningkatkan tatakelola penatausahaan keuangan daerah
- i) Meningkatkan proses dan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah
- j) Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
- k) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- l) Meningkatkan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah
- m) Meningkatkan tatakelola penatausahaan aset daerah
- n) Menyempurnakan prosedur dan standar operasional untuk memberikan kepastian pelayanan dalam meningkatkan wajib pajak
- o) Intensifikasi pajak daerah
- p) Ekstensifikasi Pajak Daerah
- q) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah
- r) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dikelola BKAD

Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sesungguhnya membentuk pola hubungan dari yang bersifat umum (general) ke khusus (spesifik). Hubungan tersebut akan nampak bila divisualisasikan dalam bentuk tabel sebagaimana terlampir. (*lampiran 1*)

2.2. Rencana Kerja Tahunan (Renja) BKAD 2021

Renja memiliki fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Proses penyusunan Renja SKPD yang dimulai dengan persiapan rancangan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi diharapkan dapat menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjabaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dan Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun 2021.

Rencana Kerja BKAD 2021 memuat urusan, Program Kegiatan, Indikator kinerja, Target kinerja dan Pagu anggaran yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021. Renja tersebut dapat dianggap sebagai langkah konkrit dan spesifik dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana tertera dalam Renstra. Tabel Renja BKAD 2021 dapat dilihat dalam lampiran laporan ini. (*lampiran 2*)

2.3. Penetapan Kinerja (Tapkin) BKAD 2021

Penetapan kinerja (Tapkin BKAD 2021) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara Kepala BKAD (pengguna anggaran entitas pelaporan) dengan Bupati Sleman. Penetapan Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan BKAD dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Melalui penetapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja di lingkungan BKAD.

Tapkin BKAD 2021 memuat Sasaran, Indikator kinerja sasaran, Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan.

Tujuan Umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah pertama, intensifikasi pencegahan korupsi. Kedua peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketiga, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sedangkan tujuan khususnya adalah pertama, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Kedua, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ketiga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dan keempat sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Target kinerja sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran. Program, Kegiatan dan Anggaran yang dicantumkan dalam Tapkin mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) BKAD 2021. **(lampiran 3).**

2.4. Indikator kinerja utama

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana salah satu indikator yang harus dibuat oleh entitas SKPD selaku penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap

tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurangkurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan/hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasar pada pemahaman tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga Negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai perlu dilakukan oleh organisasi dengan melakukan pengukuran atas kinerjanya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKAD. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Kriteria pengukuran kinerja secara umum yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kategori Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 90 %	Sangat Baik
2.	70 % sampai dengan 89,99 %	Baik
3.	55 % sampai dengan 69,99 %	Cukup
4.	Kurang dari 54,99 %	Kurang

Tahun 2021 merupakan tahun peralihan kepemimpinan sehingga pada Laporan Kinerja tahun 2021 menampilkan capaian atas sasaran strategis yang mendasarkan rencana strategis (Renstra) lama dan baru. Berikut adalah sasaran strategis yang dilaksanakan BKAD:

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah (tercantum pada renstra lama dan baru)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sasaran ini dicapai melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota dari 3 kegiatan. Ketiga kegiatan yang mendukung program tersebut adalah:

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah
- c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk mencapai sasaran ini adalah sebesar pada tahun 2021 sebesar Rp 28.978.896.219,- realisasi fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 28.978.896.219,- atau 82,47% dengan sisa anggaran Rp 6.159.388.272,-. Adapun alokasi anggaran dan realisasi masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 118.324.750,- realisasi sebesar Rp 80.190.575,- atau sebesar 67,77%.
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 34.244.078.967,- realisasi sebesar 28.244.078.967,- atau 82,53%.
- c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 796.626.000,- realisasi sebesar Rp 654.626.677,- atau sebesar 82,17%.

Sasaran meningkatnya kinerja akuntabilitas perangkat daerah tercantum pada rencana strategis lama maupun baru dengan menggunakan indikator yang sama. Berikut adalah target dan capaian indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

Tabel 3.2 Indikator Sasaran 1

Indikator	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Predikat AKIP	Nilai	A	B	A	BB	A	A	A	A	A	A

Berhasilnya Indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah dipengaruhi beberapa faktor sebagaimana tersebut dibawah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah :

- a. Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah
- b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf
- c. Ketersediaan data yang cukup sehingga memperlancar upaya peningkatan perbaikan serta perencanaannya
- d. Sistem informasi terintegrasi sehingga membantu mengurai permasalahan keterlambatan perencanaan dan pelaporan perangkat daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (tercantum pada renstra lama dan baru)

Sasaran ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah dari 4 kegiatan. Keempat kegiatan dengan anggaran dan realisasi untuk mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi umum perangkat daerah alokasi anggaran sebesar Rp 1.670.651.834,- realisasi sebesar Rp 1.218.657.528,- atau 72,95%.
- b. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 8.095.533.484,- realisasi sebesar Rp. 6.897.215.835,- atau 85,20%.
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 38.786.527.894,- realisasi sebesar Rp. 34.081.780.740,- atau sebesar 87,87%.
- d. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 1.403.820.000,- realisasi sebesar Rp 770.072.562,- atau 54,86%.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan satu indikator kinerja, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 104,13 % dengan predikat **“Sangat Baik”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik selama 5 (lima) tahun disajikan dalam tabel berikut 3.3.

Tabel 3.3 Indikator Sasaran 2				
Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat				
NO	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	2017	78,67	79,16	100,62
2.	2018	78,74	79,96	101,40
3.	2019	78,80	77,89	101,67
4.	2020	78,87	78,24	99,20
5.	2021	81,00	82,26	101,55

Realisasi angka Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,26 merupakan angka indeks yang diperoleh dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dengan responden pengguna jasa/layanan BKAD. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada 2 UPT dibawah BKAD dilakukan secara mandiri. Masing-masing capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada kedua UPT adalah, untuk UPT Stadion Maguwoharjo diperoleh indeks kepuasan masyarakat sebesar 80,43 dan UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal diperoleh nilai indeks sebesar 85,84. Dengan demikian pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah berkategori **“Sangat Baik”**.

Atas capaian tersebut BKAD tetap perlu memperhatikan unsur-unsur pelayanan yang mengedepankan kepuasan pada pengguna jasa dan meminimalisir kesulitan-kesulitan serta permasalahan yang dikeluhkan oleh pengguna jasa. Sehingga tetap menyusun langkah dan strategi untuk peningkatan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain:

- a. Adanya komitmen jajaran birokrasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana telah menjadi tujuan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana salah satu mekanisme evaluasi yang melibatkan masyarakat adalah melalui Survey Kepuasan Masyarakat
- b. Pengguna jasa yang telah bersedia menjadi objek Survey Kepuasan Masyarakat, sehingga teknis pengambilan data IKM menjadi lebih mudah dan lancar
- c. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019.
- d. Telah ditetapkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 70.1/Kep.KDH/ A/2015 tentang Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah (tercantum pada renstra lama)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan seluruh *stakeholder* mulai dari para bendahara perangkat daerah sampai dengan kepala daerah. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah diperlukan koordinasi dan peran aktif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Perencanaan khususnya menyangkut angka prediksi ataupun target anggaran yang hendaknya diperhitungkan sematang mungkin. Pelaksanaan menyangkut realisasi anggaran hendaknya dilakukan seefisien dan seefektif mungkin, penggunaan dana agar dipertanggung jawabkan sebaik mungkin serta pelaporan agar dibuat dengan tepat waktu dan akurat.

Sasaran ini dimaksudkan pula untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang/aset milik daerah sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang/aset daerah. Pengelolaan barang/aset milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan penatausahaan barang/aset milik daerah meliputi penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang/aset milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dilakukan pencatatan. Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses penatausahaan dan inventarisasi diperlukan untuk pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran, dan pengelola barang. Jumlah dana yang dialokasikan untuk melaksanakan sasaran meningkatnya kinerja keuangan daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 362.372.966.170,-. Realisasi fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 300.373.655.390,- atau 82,89%. Indikator pencapaian atas sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah adalah Opini BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2020 yang diterima hasilnya pada tahun 2021. Capaian sasaran meningkatnya kinerja akuntabilitas keuangan daerah 100% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

Tabel 3.4 Indikator Sasaran 3

Indikator : Opini BPK				
NO	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2017	WTP	WTP	100%
2.	2018	WTP	WTP	100%
3.	2019	WTP	WTP	100%
4.	2020	WTP	WTP	100%
5.	2021	WTP	WTP	100%

Sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah” ini dicapai melalui Program Pengelolaan keuangan daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran meningkatnya kinerja keuangan daerah melalui program pengelolaan keuangan daerah didukung dengan 4 kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Daerah dan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Indikator dari kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tepat waktu. Menyediakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2021 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman 2022. Penetapan Perda/Perbup Perubahan 2021 berhasil ditetapkan pada tanggal 30 September 2021, maksimal penetapan adalah tanggal 31 September tahun berjalan. Penetapan Perda/Perbup Perubahan 2022 lebih lambat dibanding Perda/Perbup Perubahan APBD 2020 yaitu tanggal 22 September 2020. Penetapan pada tanggal tersebut tidak terlepas dari agenda DPRD. Penetapan Perda dan Perbup APBD Kabupaten Sleman 2022 harus melewati serangkaian proses dari Penyusunan RKPD, KUA, RKA, Rancangan Perda APBD hingga penetapan Perda APBD 2022 yang sesuai ketentuan (Permendagri nomor 77 tahun 2020) paling lambat harus sudah ditetapkan tanggal 31 Desember 2021. Perda APBD Kabupaten Sleman 2022 ditetapkan tanggal 13 Desember 2021, lebih cepat 5 hari dibanding penetapan perda APBD tahun 2021 yaitu tanggal 18 Desember 2020. Berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020 penetapan perda masih sesuai dengan ketentuan, namun tidak memenuhi nilai yang ditentukan Komite Pemberantasan Korupsi dalam rangka mensupervisi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan melalui indikator yang ditentukan KPK yaitu tidak melebihi bulan Nopember sebelum tahun anggaran. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong akselerasi penyerapan anggaran sehingga mempercepat pergerakan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Salah satu fungsi BKAD adalah sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah) yang tugas utamanya adalah menyediakan dan melakukan pencairan dana atas beban rekening kas daerah sebagaimana diminta oleh Pengguna Anggaran. Penyediaan dana sudah mengacu rencana penyediaan tercantum dalam anggaran kas. Tingkat keberhasilan kinerja diukur dengan ketepatan waktu pencairan dan penatausahaan keuangan daerah. Dalam hal penatausahaan keuangan daerah termasuk pula mengatur ketersediaan dana sebagaimana diminta oleh pengguna anggaran, untuk keperluan belanja baik langsung maupun tidak langsung sudah sesuai dengan kebutuhan. BUD sudah menjalankan fungsi penyediaan dana sesuai rencana/kebutuhan. Pelaksanaan fungsi ini dapat dilihat dari data penerbitan SP2D tahun 2021 yang tepat waktu dan mencukupi kebutuhan belanja APBD 2021 dengan total pencairan SP2D Rp 2.567.470.258.302,83.

Dalam penatausahaan keuangan daerah BKAD berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan teknologi yang ada sehingga administrasi penatausahaan keuangan daerah lebih cepat dan lebih valid. Sistem Informasi Keuangan Daerah telah mengakomodir kebutuhan penatausahaan keuangan daerah yang secara *online* terhubung dengan Bank Kasda.



Gambar 3.1 Seminar dan Workshop Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik, Aktivasi Akun AMS dan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pada bulan Nopember tahun 2021 BKAD menyelenggarakan seminar dan workshop Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dan Aktivasi Akun AMS untuk penerbitan sertifikat elektronik. Acara tersebut tidak hanya bermanfaat untuk BKAD saja melainkan juga seluruh perangkat daerah selaku pengguna anggaran dan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran. BKAD selaku BUD telah memanfaatkan tanda tangan elektronik tersebut untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) *online*.

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Daerah

Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri dari Laporan Keuangan Kabupaten Sleman tahun 2020 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Sleman adalah tugas rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan adalah menyusun Laporan Keuangan Kabupaten Sleman tahun 2020. Maksimal penyerahan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sehingga laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 maksimal diserahkan pada tanggal 31 Maret 2021. Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan Laporan Keuangan dan Laporan pertanggungjawaban APBD TA 2020 kepada BPK tanggal 13 Januari 2021 sehingga lebih awal 7 hari dibanding penyerahan laporan keuangan tahun sebelumnya yaitu tanggal 20 Januari, sedangkan ketentuan maksimal adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Target dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Sleman 2020 adalah Opini WTP. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01B/LHP/XV/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 dinyatakan WTP. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sleman telah 10 kali memperoleh predikat WTP. Sedangkan penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 dan Penetapan Perda/Perbup Pertanggungjawaban APBD 2020 berhasil ditetapkan lebih awal sejalan dengan penyelesaian laporan keuangan yang lebih awal. Perda Pertanggungjawaban APBD 2020 ditetapkan tanggal 21 Mei 2021 dengan nomor ketetapan Nomor 2 Tahun 2021. Dengan

demikian lebih awal 7 hari dibanding penetapan laporan keuangan tahun sebelumnya. Sedangkan Perbup Pertanggungjawaban APBD juga ditetapkan pada hari yang sama dengan penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD.



Gambar 3.2 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2020

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk melaksanakan fungsi BKAD selaku pejabat pengelola keuangan daerah diantaranya adalah untuk mendanai kebutuhan hibah, bansos, bantuan keuangan, bagi hasil kepada desa dan kebutuhan darurat. BKAD dalam hal ini menjalankan fungsinya mentransfer kebutuhan-kebutuhan tersebut atas permohonan dari perangkat daerah teknis. Sedangkan verifikasi atas pengajuan dana-dana dari desa maupun dari organisasi maupun kelompok masyarakat dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis. Pada tahun 2021 BKAD telah mencairkan sejumlah Rp 295.369.608.580,00 atau sebesar 83,05% dari anggaran yang teralokasi sebesar Rp 355.640.941.380,00. Dari total pencairan tersebut Rp 211.169.674.840,00 untuk bantuan keuangan, Rp27.619.328.647,00 untuk belanja tidak terduga (darurat) dan bagi hasil sebesar Rp27.619.328.647,00.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasar Peraturan Bupati nomor 8.1 Tahun 2020 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang bertugas memberi pertimbangan dan melaksanakan koordinasi dalam hal pelaksanaan penertiban barang.

Pengelolaan barang daerah berawal kondisi awal Laporan Barang Milik Daerah (BMD) dan berakhir pada Laporan BMD akhir tahun. Dalam perjalanan selama tahun 2021 Laporan BMD awal akan mengalami perubahan karena terdapat perencanaan kebutuhan pengadaan barang dan jasa (RKBU), proses pengadaan, distribusi, penghapusan, inventarisasi (pencatatan dan penilaian) dan kembali ke Pelaporan BMD lagi. Faktor lain yang berpengaruh terhadap Laporan BMD adalah pemeliharaan BMD, TPTGR, penyelesaian status hukum BMD, dan tentu saja efektifitas/efisiensi penyusunan laporan (SIM ASET).

Penyusunan laporan barang milik daerah mengandalkan sistem SIMASET (Sistem Informasi Manajemen Aset dan aplikasi SIDIAN (Sistem Informasi Persediaan). SIMASET yang telah terintegrasi dengan sistem informasi keuangan untuk penyusunan neraca sangat membantu meningkatkan proses penyusunan laporan keuangan lebih cepat dan lebih valid. Dalam hal pengelolaan persediaan, telah dibuat aplikasi persediaan sehingga memudahkan pengurus barang dalam menatausahakan sediaan yang dimiliki perangkat daerah. Proses rekonsiliasi yang menyandingkan catatan keuangan dan catatan sediaan maupun aset dilakukan setiap bulan. Hasil rekonsiliasi yang berupa berita acara rekonsiliasi menjadi persyaratan pengajuan GU (Ganti Uang). Hal ini mendorong perangkat daerah untuk segera menertibkan administrasi barang baik aset maupun sediaan, sehingga meminimalisir permasalahan akhir tahun dan juga mempercepat penyusunan laporan keuangan perangkat daerah dan juga laporan keuangan pemerintah daerah (laporan konsolidasi). Disamping itu data yang tersaji lebih cepat dan lebih valid. Harapan mendatang SIMASET dapat terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran sehingga lebih tepat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan skala prioritas sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk program pengelolaan barang milik daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 5.591.064.980,- terrealisasi sebesar Rp 4.905.696.421,- atau sebesar 87,74%.

Sedangkan target indikator program pengelolaan barang milik daerah adalah Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A sebesar 82%. Target tersebut pada tahun 2021 tercapai 100% yang berarti bahwa sebanyak 82% dari total perangkat daerah tahun 2021 berkategori A.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

- a. Tingkat kemampuan SDM menguasai teknologi informasi sekaligus pengelolaan keuangan
- b. Belum meratanya tingkat pengetahuan pengelolaan aset
- c. Terintegrasikannya pengelolaan aset dengan pengelolaan keuangan sehingga membantu proses penyelesaian penyusunan laporan keuangan
- d. Dilakukannya rekonsiliasi aset dan sediaan tiap bulan sebagai persyaratan pengajuan ganti uang (GU) mendorong pengadministrasian barang milik daerah lebih tertib dan mengurangi permasalahan yang menumpuk
- e. Tingkat kedisiplinan pengguna barang perangkat daerah dalam hal penatausahaan dan pengelolaan aset tetap seperti kesadaran melakukan rekonsiliasi, kesadaran penyerahan aset yang *idle* dan pemanfaatan aset sesuai ketentuan

Sasaran 4 : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah (tercantum pada renstra lama)

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan. Kemandirian keuangan daerah bergantung pada pendapatan daerah, yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pajak dan Retribusi merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah yang mendukung kemandirian keuangan daerah.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan

untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan capaian pajak dan retribusi sebagai kontribusi dari pencapaian pendapatan daerah keseluruhan, sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang didukung dengan 17 kegiatan.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk BKAD mencapai sasaran ini pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 13.449.696.375,- Realisasi fisik mencapai 103,8% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 10.890.115.829,- atau 80,97% dengan sisa anggaran Rp 2.559.580.546,-. Indikator sasaran ini adalah tercapainya target PAD sebesar 35 persen dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Pendapatan daerah tahun 2021 terrealisasi sebesar Rp 2.793.328.384.634,58 (*unaudited*), sedangkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 803.679.358.719,08 (*unaudited*) atau 28,77% dari pendapatan daerah Rp 2.793.328.384.634,58. Capaian yang diperoleh dari sasaran ini sebesar 82,20% dikategorikan **“Baik”**.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah yang bersumber dari 10 jenis pajak berhasil terealisasi penerimaannya sebesar Rp 511.407.257.119,- (*unaudited*). Capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 488.190.000.000,- atau sebesar 104,76%. Penerimaan dari pajak daerah tersebut jika dibanding tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.445.281.983,- atau naik sebesar 2,29%. Kendati mengalami kenaikan namun masih lebih rendah dibanding kondisi sebelum adanya pandemic covid. Namun jika dibandingkan dengan target penerimaan melampaui target. Atas target yang telah disesuaikan karena pandemic covid-19 BKAD berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut.

Retribusi Daerah tahun 2021 terrealisasi sebesar Rp 38.699.706.039,- atau sebesar 98,15% dari target yang ditetapkan yaitu Rp 39.429.475.340,-. Dibanding dengan penerimaan Retribusi Daerah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,54%. Penurunan penerimaan terjadi pada retribusi pasar (los), retribusi pemakaian kekayaan

daerah, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mempekerjakan tenaga asing dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2021 terrealisasi sebesar Rp 38.164.197.265,- atau sebesar 98,55% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 38.164.197.265,08,-. Jika dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu turun sebesar 19,13%.

Sedangkan Lain-lain PAD yang sah tahun 2021 terrealisasi sebesar Rp 215.408.198.296,- atau sebesar 105,42% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 204.328.574.200,-.

Tabel 3.5 Indikator Sasaran 5

Indikator: Capaian Target PAD				
NO	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	2017	31	31,56	101,80
2.	2018	32	32,96	103,00
3.	2019	33	34,22	103,69
4.	2020	34	29,78	109,28
5.	2021	35	28,77	82,20

Pencapaian target PAD dilakukan melalui beberapa kegiatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan diantaranya adalah :

- a. Kemampuan mengenali potensi dari produk-produk yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah

Kendati hampir di sepanjang tahun 2020 pandemi covid-19 berlangsung, namun BKAD yang salah satu tupoksinya adalah pengelolaan keuangan diantaranya pengelolaan PAD, perlu upaya untuk mengenal potensi-potensi sumber PAD. Utamanya yang bersumber dari pajak. Pengenalan potensi ini dilakukan melalui kegiatan antara lain pendataan, pemantauan dan pendaftaran wajib pajak. Beberapa wajib pajak baru berhasil dilakukan pendataan walaupun di tahun 2020 banyak wajib pajak yang tutup. Terhadap wajib pajak baru selanjutnya didaftar menjadi wajib pajak daerah. Jumlah wajib pajak selain PBB per 31 Desember 2021 sebanyak 9046 wajib pajak. Sedangkan jumlah wajib pajak selain PBB pada tahun 2020 sebanyak 8.849

wajib pajak. Terdapat penurunan sebesar 2,17% atau sebanyak 197 wajib pajak yang tutup dan atau tidak lapor. Hal ini disebabkan diantaranya karena wajib pajak mengalami dampak pandemik covid-19. Disamping itu, upaya menggali dan mengenali potensi dilakukan pula secara mendalam (intensive) terhadap perilaku wajib pajak dengan tujuan mengetahui potensi riil dari wajib pajak. Secara akademis dilakukan kajian potensi pajak untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak di Kabupaten Sleman. Hasil kajian tersebut digunakan pula sebagai bahan pembandingan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan dan penentuan target pada tahun-tahun berikutnya. Terhadap perilaku wajib pajak sampai dengan saat ini masih harus dilakukan pembinaan baik itu yang sifatnya menyeluruh seperti sosialisasi maupun pembinaan khusus terhadap wajib pajak tertentu dengan cara dilakukan bedah wajib pajak dan atau pemeriksaan wajib pajak. Upaya bedah wajib pajak dan pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka membina wajib pajak untuk melakukan pengadministrasian terhadap omset wajib pajak dengan benar menurut kaidah akuntansi umumnya.

b. Publikasi melalui media cetak, media elektronik dan tatap muka

Media cetak dan media elektronik memiliki peranan penting dalam mengenalkan produk-produk kepada masyarakat pengguna jasa dan meningkatkan volume pemakaian sumber pajak dan retribusi, terlebih pada masa pandemic covid. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD khususnya berusaha meningkatkan jumlah wajib pajak aktif sehingga terus berupaya agar para pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini BKAD melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat Sleman.

Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD juga merasa perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada tahun 2021, sosialisasi ditempuh melalui beberapa upaya diantaranya: media elektronik yaitu radio sebanyak 4 kali, media cetak koran sebanyak 6 kali, *billboard* 6 dan sosialisasi sebanyak 8 kali. Sosialisasi terhadap wajib pajak tidak terbatas pada

undangan formal menghadirkan wajib pajak namun juga melalui pegawai yang ditugaskan pemantauan. Disamping itu sosialisasi juga dilakukan melalui *website* yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sleman maupun *website* yang dikelola BKAD.



Gambar 3.3 Sosialisasi kepada Wajib Pajak Daerah

c. Perbaikan pelayanan kepada wajib pajak.

Dalam upaya perbaikan pelayanan dan peningkatan validitas pengenaan pajak, BKAD memaksimalkan sumber daya diantaranya adalah teknologi. Teknologi memungkinkan pelayanan yang tepat, mudah dan hasil yang lebih valid. Pada saat ini BKAD memiliki memiliki 5 (lima) Sistem Informasi terkait penerimaan pajak yang dikelola BKAD yaitu :

1. Sistem Informasi Pajak Asli Daerah (SIMPAD)

Sistem ini sangat membantu untuk mengadministrasikan penerimaan pajak daerah selain BPHTB dan PBB (karena kedua jenis pajak tersebut berdasarkan karakteristiknya berbeda). Dengan adanya sistem ini permasalahan perhitungan jumlah pajak dan piutang akan dapat diminimalisir, serta validitas pengakuan jumlah pajak dan piutang akan lebih dapat diyakini kebenarannya.

2. Sistem Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SIM PBB-P2)

Sim PBB P2 ini telah dibangun secara online sehingga wajib pajak PBB P2 dapat melakukan pembayaran pajak PBB P2 di bank-bank yang telah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Sleman.

3. Sistem Bea Perolehan atas Peralihan Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB)

Sistem aplikasi dibuat pada tahun 2018 dengan menggunakan dana APBD perubahan dan beroperasi pada tahun 2019. Aplikasi tersebut berfungsi untuk melakukan manajemen atas pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Digunakan untuk mempermudah perhitungan dan mempermudah wajib pajak dalam pengurusan pembayaran BPHTB.

4. Sismiop PBB (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB)

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran. Sistem ini mengakomodir kebutuhan pekerjaan kantor (administratif) sejak pembentukan / pengumpulan data (dengan pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas (Nomor Objek Pajak), pemrosesan, pemeliharaan basis data, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa SPPT, STTS dan DHKP; serta Pelayanan Satu Tempat (PST). Terhitung bulan November 2018 BKAD melakukan peningkatan pelayanan terhadap beberapa aplikasi yang telah dimiliki sebelumnya dengan membuka aplikasi tersebut secara *online*. Beberapa aplikasi *online* tersebut adalah SIM PBB P2 online yang dapat digunakan untuk wajib pajak melakukan pembaharuan data terkait pajak bumi dan bangunan dan SIM BPHTB *online*.

5. e-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

Merupakan sistem aplikasi yang dibangun berbasis web yang dikembangkan sebagai sarana wajib pajak untuk mendaftarkan, membayar dan melaporkan kewajiban pajak daerahnya secara online serta dapat diakses dimana saja. Aplikasi ini terkoneksi secara *real time* dengan Sistem Informasi Pajak Asli Daerah (SIMPAD) yang sudah berjalan di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan adanya e-SPTPD online ini memudahkan wajib pajak melakukan pengadministrasian dan pembayaran pajak daerah serta mengurangi jumlah antrian wajib pajak yang datang langsung di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah.



Gambar 3.4 Loker SPTPD Online Kantor BKAD Kabupaten Sleman

5. Pemasangan *tapping device* untuk beberapa wajib pajak yang dipilih

Tapping device merupakan alat yang digunakan untuk merekam transaksi dari suatu tempat usaha secara *online*. Tujuannya untuk mencegah kecurangan, sehingga penerimaan pajak daerah menjadi maksimal. Pemasangan *tapping device* ini merupakan usulan dari Dewan dan gayung bersambut dari pemerintah pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi juga mencanangkan kegiatan serupa dalam rangka mensupervisi optimalisasi pendapatan daerah. KPK bekerja sama dengan bank Kasda setempat terkait pengadaan sewa *tapping device* tersebut. Sehingga pada tahun 2019 dipasang sebanyak 290 di alat *tapping device*, dengan rincian 250 didanai bank Kasda setempat dalam hal ini adalah Bank BPD DIY dan 40 dana dari APBD. Jumlah tersebut akan ditambahkan pada tahun-tahun berikutnya. Sosialisasi atas pemasangan alat *tapping device* ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019 dengan mengundang 1000 (seribu) wajib pajak. Pemasangan alat ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah *tapping device* yang terpasang adalah sebanyak 350.



Gambar 3.5 Pemasangan *Tapping Device* di Salah Satu Restoran di Mall

Sehubungan dengan pandemik covid-19 penambahan pemasangan alat tapping device yang telah direncanakan bertambah setiap tahunnya, tidak dapat dilaksanakan. Bahkan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui SE Bupati Nomor 973/0673 memberikan keringanan hingga seratus persen untuk wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran.

6. Whatsapp Blast (WA Blast)

Aplikasi WA Blast dibangun untuk mengganti surat teguran yang harus disampaikan langsung kepada wajib pajak. Setelah tanggal jatuh tempo pelaporna dan pembayaran pajak berakhir, BKAD Kabupaten Sleman mencetak surat teguran pajak melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD). Penyampaian surat teguran selama ini dilakukan secara manual yaitu dengan mengunjungi langsung wajib pajak. Hal tersebut kurang efektif dan efisien dalam waktu dan tenaga. Melalui WA Blast, masing-masing wajib pajak yang belum lapor dan atau belum membayar akan menerima teguran.

d. Kerjasama yang harmonis dengan beberapa pihak

Selain mengoptimalkan teknologi informasi di internal BKAD, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak PBB P2, BKAD melakukan kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran. Bank-bank dan lembaga keuangan yang telah bekerjasama dengan BKAD sampai dengan tahun 2019 tersebut adalah : Bank BPD, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI 46 dan seluruh KUD yang tergabung dalam jaringan PUSKUD Metaram.

Pada akhir 2018 kerjasama pembayaran Pajak daerah online diperluas lagi yaitu dengan menjalin kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia terhitung untuk pembayaran yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2019.

Kerjasama juga terjalin dengan instansi vertikal yaitu dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan dengan Kantor Pertanahan. Kerjasama dengan kedua instansi tersebut utamanya adalah kerjasama aliansi dalam rangka perbaikan pelayanan dan memberikan kepastian nilai Dasar Pengenaan Pajak yang sama kepada wajib pajak terkait pembayaran pajak BPHTB dan PPh pasal 4 ayat 2 untuk pajak pusat. Dengan upaya kerjasama aliansi tersebut diharapkan mendorong penerimaan pajak daerah dan pajak pusat sekaligus.

Sedangkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah menjalin hubungan baik dengan dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sebagai lembaga yang menaungi seluruh hotel dan restoran. Hal ini dilakukan untuk menjalin komunikasi antara pemerintah kabupaten Sleman dan pengelola/pemilik Hotel dan Restoran khususnya yang berada diwilayah Sleman. Demikian halnya dengan PPAT/Notaris yang ada di Sleman terkait dengan Pajak BPHTB.



Gambar 3.6 Pemberian Penghargaan Panutan Pembayaran Pajak PBB P2

Kerjasama dengan pemerintah desa tetap terus dilakukan terkait dengan upaya pencapaian pajak PBB. Kerjasama dengan desa terkait dengan pencapaian pajak PBB dimulai dengan penyampaian SPPT PBB, pemantauan penyampaian SPPT, pelaksanaan pekan pembayaran PBB, serta penagihan tunggakan-tunggakan

dengan cara jemput bola. Kerjasama dengan pemerintah desa dengan melibatkan seluruh kepala dukuh menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2021 terhitung sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat 38 kalurahan yang lunas. Sedangkan jumlah padukuhan yang lunas per 31 Desember 2021 sebanyak 601 padukuhan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 3.7 Penyampaian SPPT PBB P2 ke Kalurahan

Tabel 3.6
Jumlah Padukuhan, Kalurahan dan Kecamatan Lunas
Tahun 2017 sampai dengan 2021

No	Tahun	Padukuhan	Desa	Kecamatan
1.	2017	338	15	1
2.	2018	420	22	3
3.	2019	504	25	4
4.	2020	557	33	5
5	2021	601	38	5

e. Penegakan peraturan perpajakan

Penegakan aturan ini salah satunya ditempuh berupa pemeriksaan. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan upaya penegakan hukum agar proses dan pelaksanaan sistem sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2021 pemeriksaan dilakukan oleh salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) pemenang lelang dengan

obyek pemeriksaan sebanyak 28 dengan rincian 7 wajib pajak hotel dan 19 wajib pajak restoran. Hal ini untuk menjamin adanya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP sebagai lembaga independen diharapkan mampu menjadi pagar agar wajib pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan.

Mengingat jumlah wajib pajak daerah yang banyak tidak memungkinkan keseluruhan pemeriksaan dilakukan oleh KAP. Pemeriksaan kepada wajib pajak juga dilakukan oleh staf BKAD dengan obyek pajak selain yang menjadi obyek pemeriksaan KAP dipilih sampling dengan berdasarkan *track record* wajib pajak.



Gambar 3.8 Kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka penegakan peraturan

Sasaran 5 : Tercapainya penyertaan modal daerah pada BUMD (tercantum pada renstra lama)

Implementasi otonomi daerah telah membawa iklim baru pada semua Kabupaten dan Kota di Indonesia. Daerah diberi lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya lokal yang ada di daerahnya masing- masing. Secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal. Setoran modal ini juga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka peningkatan sumber kas daerah.

Dalam melaksanakan penyertaan modal ini, yang terlebih dahulu harus diperhatikan adalah dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat Kabupaten Sleman. Oleh karena itu pengambilan keputusan untuk melakukan penyertaan modal pada 3 BUMD yang ada di Kabupaten Sleman dilakukan melalui pengkajian-pengkajian yang diwadahi dalam suatu sub kegiatan yaitu penatausahaan pembiayaan. Pada sasaran ini tahun 2021 tidak ada kegiatan yang mendukung. BKAD melaksanakan amanat Peraturan Daerah untuk menempatkan sejumlah dananya pada BUMD. Capaian sasaran Tercapainya Penyertaan Modal pada BUMD dikategorikan **“Sangat Baik”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “tercapainya penyertaan modal daerah pada BUMD” disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7 Indikator Sasaran 5				
Indikator : Realisasi Penyertaan Modal Pada BUMD				
NO	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	2017	100	100	100
2.	2018	100	92,42	92,42
3.	2019	100	96,93	96,93
4.	2020	100	92,24	92,24
5.	2021	100	100	100

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah :
- a. Sistem desentralisasi fiskal yang memberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerah sesuai dengan potensi kapasitas daerah.
 - b. Adanya BUMD yang memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam menumbuhkan kekuatan perekonomian daerah.
 - c. Telah diputuskannya Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman.
 - d. Telah dipustuskannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Air Minum Daerah Sleman.

Sasaran 6: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (tercantum pada renstra lama).

Sebagaimana disebutkan dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota dilakukan Provinsi. Terdapat 6 (enam) dimensi yang diukur dalam pengukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
- b. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
- c. transparansi pengelolaan keuangan daerah
- d. penyerapan anggaran
- e. kondisi keuangan daerah
- f. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LPD

Hasil pengukuran IPKD dikelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dikelompokkan sebagai tinggi, sedang atau rendah. Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan kemampuan keuangan daerah termasuk kelompok tinggi.

Adapun target capaian atas sasaran meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah B yang didefinisikan sebagai kategori pengelolaan keuangan daerah perlu perbaikan. Dari hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sleman berkategori perlu perbaikan (B) dengan total indeks yang diperoleh adalah sebesar 56,99 sedangkan indeks rata-rata pada kelompok berkemampuan keuangan tinggi adalah sebesar 55,28.

Sasaran “meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah” ini dicapai melalui Program Pengelolaan keuangan daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Sedangkan kegiatan yang mendukung adalah

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Penunjuang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target sasaran ini adalah sebesar Rp 375.822.662.545,- dengan realisasi sebesar Rp 311.263.771.219,- atau sebesar 82,82%. Dengan demikian efisiensi anggaran adalah sebesar Rp 64.558.891.326,- atau sebesar 17,18%

Tabel 3.8 Indikator Sasaran 6				
Indikator : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				
NO	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
1.	2021	B	B	100

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan:
- a. Tingkat kemampuan SDM menguasai teknologi informasi sekaligus pengelolaan keuangan.
 - b. Ketepatan waktu penyusunan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa dan pelaporan keuangan daerah.
 - c. Komitmen manajemen untuk melaksanakan *spending mandatory* dalam pengalokasian belanja pada APBD.
 - d. Diberikannya kewenangan daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah sangat berpengaruh pada tingkat kemandirian keuangan daerah sehingga berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah.
 - e. Supervisi dari pemerintah pusat melalui Komite Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah baik itu untuk mengakselerasi penyerapan anggaran maupun optimasi pendapatan asli daerah.
 - f. Telah ditetapkanya Peraturan Daerah Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.2. Pengukuran Capaian Indikator Kegiatan

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentasi, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran capaian kinerja indikator kegiatan berusaha untuk menyajikan seberapa besar target input yang meliputi Anggaran, Sumber Daya Manusia, Peralatan, Waktu, target keluaran dan target hasil tercapai. Dari pelaksanaan kegiatan BKAD tahun 2021 diperoleh hasil rata-rata tingkat capaian indikator masukan dana adalah sebesar 81,97 dan rata-rata tingkat capaian indikator keluaran kegiatan sebesar 103,52%. **(rincian perhitungan: Lampiran 4).**

a. Beberapa catatan yang berkaitan dengan realisasi indikator kinerja kegiatan antara lain:

1. Capaian Tahun 2021 dapat dikatakan merupakan capaian indikator yang tidak normal, terutama indikator pencapaian PAD. Hal ini disebabkan kondisi pandemic global yang melanda sehingga sangat berpengaruh pada capaian indikator. Beberapa pengusaha terpuruk ekonominya sehingga menutup usaha, baik tutup sementara maupun tutup permanen.
2. Dinamika pengelolaan keuangan, dalam hal ini adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, beberapa kali dilakukan revisi karena status darurat yang diterbitkan dan berlaku satu bulan. Revisi diantaranya mengakomodir peralihan Belanja Tidak Terduga beralih ke belanja langsung terutama untuk kebutuhan penanganan pandemik covid-19.
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas disebabkan karena bersifat antisipatif terhadap kerusakan pada perlengkapan dan peralatan gedung dengan tetap mengupayakan pengeluaran sesuai kebutuhan serta tingkat kerusakan yang menjadi kewenangan BKAD untuk melakukan pemeliharaan tersebut. Diantaranya juga terdapat anggaran untuk Bahan Bakar Minyak yang dapat dikatakan efisien karena pengeluaran untuk Bahan Bakar Minyak sesuai kebutuhan.

4. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat dibangun secara bertumbuh, perlu upaya besar untuk mengatur tata kelola keuangan dapat berjalan lancar baik itu untuk memberikan informasi ke pemerintah pusat maupun tata kelola internal Pemerintah Kabupaten Sleman. Penyesuaian terhadap sistem baru ini membutuhkan upaya besar untuk dapat mengaplikasikannya tentu saja dengan kemungkinan resiko yang menyertai, diantaranya adalah resiko lebih lambatnya waktu yang dicapai.
2. Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah perlu upaya lebih besar lagi terlebih adanya sistem baru dari pemerintah pusat. Sistem keuangan lokal yang telah berjalan telah mengakomodir manajemen cash sistem bank kasda. Adanya sistem baru, perlu upaya yang besar hal ini dikarenakan sistem penatausahaan keuangan lebih rumit dibanding sistem penganggaran sehingga dengan melihat sistem informasi dari pusat yang mengalami beberapa kali pemutakhiran baik pada menu perencanaan dan penganggaran maka dikhawatirkan pula akan terjadi pada menu penatausahaan dan menu pelaporan. Masalah yang timbul membutuhkan waktu lebih lama untuk mengatasinya dibanding jika menggunakan sistem lokal yang dibangun sendiri.
3. Kebijakan desentralisasi pengadaan peralatan mesin dan pengadaan mebelair diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong pemenuhan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka memperlancar jalannya pemerintahan. Hal ini tentu saja harus diimbangi dengan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan dokumen penyusunan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah secara tertib. Periodisasi penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah harus diatur secara tepat sehingga TAPD memiliki waktu yang cukup untuk menyusun prioritas kebutuhan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
4. Realisasi fisik dan keuangan beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai rencana dan terakumulasi di akhir tahun anggaran serta penyerapan anggaran kurang dapat berjalan optimal. Dengan adanya kebijakan penyerapan anggaran yang dikaitkan dengan tunjangan penghasilan pegawai dapat mendorong masing-masing

koordinator kegiatan untuk menepati jadwal penyerapan sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

5. Kapasitas dan kapabilitas pegawai dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sepenuhnya berbasis akrual serta dalam hal pengelolaan keuangan dan asset masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan dan asset.
6. Perencanaan program dan kegiatan belum menggunakan data/informasi yang akurat sebagai dasar penentuan kebutuhan dimasa datang.
7. Program dan kegiatan belum semuanya didukung dengan SOP sehingga berpotensi menimbulkan masalah pengendalian.
8. Tuntutan peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun instansi lain mengharuskan Badan keuangan dan Aset Daerah senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan secara terus menerus

Kegiatan lain dapat dikatakan mampu merealisasikan output 100% dari kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keuangan dan aset meskipun masih menyisakan anggaran namun hal ini lebih disebabkan karena dinamika di lapangan dan tidak mengurangi output sebagaimana direncanakan pada awal tahun atau saat perubahan APBD 2021.

3.3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung anggaran sebesar Rp 464.127.248,-

Belanja sebagaimana yang dialokasikan digunakan untuk melaksanakan urusan keuangan dengan, dijabarkan dalam 4 program yang meliputi 13 kegiatan dan 59 sub kegiatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021, karena adanya refocusing dan juga penyesuaian target pendapatan dilakukan perubahan target dan anggaran untuk pengalokasian belanja. Adapun rincian pendapatan dan belanja terlampir. (**Lampiran 5**)

Tabel 3.9
Rincian Belanja Langsung BKAD TA 2021

Kode Urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran
				Bulan Ini	Bulan Lalu	s.d Bulan Ini	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		460.122.740.248	42.903.860.111	343.075.014.042	385.978.874.153	83,89	99,95	74.143.866.095
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	KEUANGAN		460.122.740.248	42.903.860.111	343.075.014.042	385.978.874.153	83,89	100,54	74.143.866.095
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		84.300.077.703	6.954.966.380	67.760.136.554	74.715.102.934	88,63	99,58	9.584.974.769
5.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev	76.060.000	19.283.975	22.177.490	41.461.465	54,51	100,00	34.598.535
5.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev	7.563.750	4.987.110	979.150	5.966.260	78,88	100,00	1.597.490
5.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev	1.588.725	0	1.543.250	1.543.250	97,14	100,00	45.475
5.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev	1.588.725	234.055	1.101.300	1.335.355	84,05	100,00	253.370
5.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev	1.588.725	238.575	1.087.350	1.325.925	83,46	100,00	262.800
5.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev	29.934.825	10.955.215	17.603.105	28.558.320	95,40	100,00	1.376.505
5.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Misri Rusmiyati, SE, M.M	33.214.087.616	767.924.625	26.820.322.344	27.588.246.969	83,06	100,00	5.625.840.647
5.02.01.2.02.03	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Misri Rusmiyati, SE, M.M	801.850.000	66.382.500	477.415.100	543.797.600	67,82	100,00	258.052.400
5.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	Misri Rusmiyati, SE, M.M	207.396.125	29.382.900	82.651.498	112.034.398	54,02	100,00	95.361.727
5.02.01.2.05.03	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	796.626.000	54.889.782	599.736.895	654.626.677	82,17	100,00	141.999.323
5.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	132.077.230	29.600.000	57.557.182	87.157.182	65,99	100,00	44.920.048
5.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	846.240.656	171.415.725	486.132.185	657.547.910	77,70	100,00	188.692.746
5.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAAN	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	385.313.948	58.371.750	117.023.800	175.395.550	45,52	90,00	209.918.398

Kode Urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran
				Bulan Ini	Bulan Lalu	s.d Bulan Ini	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
5.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	36.000.000	17.549.915	17.260.900	34.810.815	96,70	100,00	1.189.185
5.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	271.020.000	71.451.960	192.294.111	263.746.071	97,32	100,00	7.273.929
5.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev	1.503.600.000	1.152.139.870	232.950.000	1.385.089.870	92,12	100,00	118.510.130
5.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev	6.591.933.484	1.148.246.289	4.363.879.676	5.512.125.965	83,62	100,00	1.079.807.519
5.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	142.023.000	45.000	85.679.465	85.724.465	60,36	100,00	56.298.535
5.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	37.358.553.600	3.040.472.441	33.294.289.039	36.334.761.480	97,26	100,00	1.023.792.120
5.02.01.2.08.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	60.544.300	0	41.693.575	41.693.575	68,86	100,00	18.850.725
5.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	430.666.994	19.568.000	368.513.270	388.081.270	90,11	100,00	42.585.724
5.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	794.740.000	78.921.293	291.605.391	370.526.684	46,62	100,00	424.213.316
5.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	198.020.000	33.883.000	85.599.700	119.482.700	60,34	100,00	78.537.300
5.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	411.060.000	179.022.400	101.040.778	280.063.178	68,13	100,00	130.996.822
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		359.865.358.190	32.898.135.949	265.219.195.898	298.117.331.847	82,84	100,00	61.748.026.343
5.02.02.2.01.01	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev	240.992.000	69.743.500	163.122.375	232.865.875	96,63	100,00	8.126.125
5.02.02.2.01.03	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	161.460.000	0	1.791.500	1.791.500	1,11	100,00	159.668.500
5.02.02.2.01.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	2.393.222.450	355.891.050	852.626.575	1.208.517.625	50,50	100,00	1.184.704.825
5.02.02.2.01.09	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT	263.669.625	46.764.000	207.238.425	254.002.425	96,33	100,00	9.667.200

Kode Urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran
				Bulan Ini	Bulan Lalu	s.d Bulan Ini	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
5.02.02.2.01.13	PEMBINAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT	54.468.700	19.327.550	28.692.100	48.019.650	88,16	100,00	6.449.050
5.02.02.2.02.01	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	Iwan Setyadi, SE, Ak	77.439.200	3.913.600	60.692.367	64.605.967	83,43	100,00	12.833.233
5.02.02.2.02.03	PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	Iwan Setyadi, SE, Ak	171.250.000	60.482.000	84.265.500	144.747.500	84,52	100,00	26.502.500
5.02.02.2.02.04	PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev	33.300.500	4.100.175	23.481.600	27.581.775	82,83	100,00	5.718.725
5.02.02.2.02.05	KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	Iwan Setyadi, SE, Ak	20.920.000	6.780.000	13.539.500	20.319.500	97,13	100,00	600.500
5.02.02.2.02.06	KOORDINASI, PELAKSANAAN KERJASAMA DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	Agus Wahyu Arimindarko, SE	100.248.885	12.605.000	84.925.500	97.530.500	97,29	100,00	2.718.385
5.02.02.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)	Agus Wahyu Arimindarko, SE	31.001.700	0	30.011.500	30.011.500	96,81	100,00	990.200
5.02.02.2.02.09	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	Iwan Setyadi, SE, Ak	47.985.000	4.132.000	41.536.500	45.668.500	95,17	100,00	2.316.500
5.02.02.2.03.01	KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	Wijayasari, SE, MM	7.548.750	0	2.211.300	2.211.300	29,29	100,00	5.337.450
5.02.02.2.03.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	Sri Suryanti, SE	442.591.950	5.114.900	403.365.250	408.480.150	92,29	100,00	34.111.800

Kode Urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran
				Bulan Ini	Bulan Lalu	s.d Bulan Ini	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
5.02.02.2.03.09	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	Sri Suryanti, SE	154.003.200	11.956.800	137.914.600	149.871.400	97,32	100,00	4.131.800
5.02.02.2.03.11	PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Wijayasari, SE, MM	24.314.850	1.219.600	10.278.500	11.498.100	47,29	100,00	12.816.750
5.02.02.2.04.08	ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	Misri Rusmiyati, SE, M.M	248.515.171.450	14.004.941.492	197.164.733.348	211.169.674.840	84,97	100,00	37.345.496.610
5.02.02.2.04.09	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	Misri Rusmiyati, SE, M.M	49.068.048.067	2.413.451.970	25.205.876.677	27.619.328.647	56,29	100,00	21.448.719.420
5.02.02.2.04.10	PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	Misri Rusmiyati, SE, M.M	58.057.721.863	15.877.712.312	40.702.892.781	56.580.605.093	97,46	100,00	1.477.116.770
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		2.507.607.980	834.803.711	1.421.519.832	2.256.323.543	89,98	100,00	251.284.437
5.02.03.2.01.02	PENYUSUNAN STANDAR BARANG MILIK DAERAH DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev	774.566.990	336.453.320	380.062.412	716.515.732	92,51	100,00	58.051.258
5.02.03.2.01.05	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si	81.509.925	46.841.000	30.097.573	76.938.573	94,39	100,00	4.571.352
5.02.03.2.01.07	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	Muh. Yunan Nutrianto, S.STP, M.Sc	815.290.550	247.725.991	519.359.861	767.085.852	94,09	100,00	48.204.698
5.02.03.2.01.10	OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	Muh. Yunan Nutrianto, S.STP, M.Sc	504.149.750	131.865.800	329.523.231	461.389.031	91,52	100,00	42.760.719
5.02.03.2.01.13	PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si	332.090.765	71.917.600	162.476.755	234.394.355	70,58	100,00	97.696.410
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		13.449.696.375	2.215.954.071	8.674.161.758	10.890.115.829	80,97	103,80	2.559.580.546
5.02.04.2.01.02	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH.	Danang Mintoko, SE	57.720.000	24.870.000	17.085.950	41.955.950	72,69	100,00	15.764.050
5.02.04.2.01.03	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	Danang Mintoko, SE	121.119.800	21.622.300	52.215.500	73.837.800	60,96	100,00	47.282.000
5.02.04.2.01.06	PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	Ivhal Ilyas, S.Sos.,M.A.,M.Ec.Dev	814.718.375	160.732.700	365.068.000	525.800.700	64,54	92,00	288.917.675

Kode Urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran
				Bulan Ini	Bulan Lalu	s.d Bulan Ini	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
5.02.04.2.01.07	PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	628.294.975	51.952.800	394.035.400	445.988.200	70,98	105,00	182.306.775
5.02.04.2.01.08	PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	294.390.725	19.811.200	250.946.200	270.757.400	91,97	100,00	23.633.325
5.02.04.2.01.09	PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	Ivhal Ilyas, S.Sos.,M.A.,M.Ec.Dev	606.259.000	56.544.700	394.712.634	451.257.334	74,43	96,00	155.001.666
5.02.04.2.01.10	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	Deni Ria Setiawati, SE, MM	147.864.000	12.891.000	132.032.986	144.923.986	98,01	100,00	2.940.014
5.02.04.2.01.11	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc	8.698.459.800	1.570.699.521	5.523.558.120	7.094.257.641	81,56	100,00	1.604.202.159
5.02.04.2.01.12	PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	Anik Rohmatul Fudla, SE	39.289.900	3.659.250	29.953.950	33.613.200	85,55	156,80	5.676.700
5.02.04.2.01.13	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	Deni Ria Setiawati, SE, MM	1.966.826.000	285.894.000	1.454.760.901	1.740.654.901	88,50	92,00	226.171.099
5.02.04.2.01.14	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	Danang Mintoko, SE	74.753.800	7.276.600	59.792.117	67.068.717	89,72	100,00	7.685.083

Tabel 3.10
Rincian Belanja Langsung UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal TA 2021

Kode Urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran
				Bulan Ini	Bulan Lalu	s.d Bulan Ini	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
5.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWO HARJO		3.083.457.000	321.337.406	2.328.035.472	2.649.372.878	85,92	100,00	434.084.122
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0001	KEUANGAN		3.083.457.000	321.337.406	2.328.035.472	2.649.372.878	85,92	100,00	434.084.122
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		3.083.457.000	321.337.406	2.328.035.472	2.649.372.878	85,92	100,00	434.084.122
5.02.03.2.01.13	PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Suroto, S.Sos	3.083.457.000	321.337.406	2.328.035.472	2.649.372.878	85,92	100,00	434.084.122

Tabel 3.11
Rincian Belanja Langsung UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo Tahun 2021

Kode Urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran
				Bulan Ini	Bulan Lalu	s.d Bulan Ini	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
5.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL		921.400.000	41.875.431	553.407.290	595.282.721	64,61	100,00	326.117.279
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0002	KEUANGAN		921.400.000	41.875.431	553.407.290	595.282.721	64,61	100,00	326.117.279
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		921.400.000	41.875.431	553.407.290	595.282.721	64,61	100,00	326.117.279
5.02.02.2.02.08	KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS	Rumiyati, S.IP	921.400.000	41.875.431	553.407.290	595.282.721	64,61	100,00	326.117.279

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman tahun 2021 merepresentasikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah Kabupaten Sleman.

Upaya untuk menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib terus dilakukan untuk dapat mengikuti dinamika peraturan dan ketentuan dibidang pengelolaan keuangan yang terus berubah dari tahun ke tahun. Laporan ini memuat capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja indikator kegiatan penunjang sasaran strategis beserta analisis yang diperlukan. Data pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan sebagai bahan evaluasi dan sebagai salah satu acuan dalam rangka perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya, khususnya guna perbaikan kinerja BKAD di masa datang.

Perlu disadari bahwa setiap perubahan yang terjadi adalah karena adanya keinginan dan dorongan untuk lebih baik dari sebelumnya. Diperlukan komitmen dari semua pihak untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Selain itu juga diperlukan kemampuan aparat pengelola keuangan dan pemahaman serta tekad yang kuat melakukan perubahan untuk mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 (LKjIP) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Tentu dalam laporan ini masih banyak kekurangan baik dalam hal format/kaidah pelaporan yang baik maupun dalam hal redaksional.

Lampiran:

- 1. Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi**
- 2. Tabel Renja BKAD 2021**
- 3. Penetapan Kinerja (Tapkin) Perangkat Daerah 2021**
- 4. Pengukuran Capaian Indikator Kegiatan 2021**
- 5. LRA Pendapatan dan Belanja Daerah BKAD 2021**
- 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Eselon II)**

Lampiran 1 : Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target, Strategi dan Kebijakan

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	81	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	A	Meningkatkan penyusunan perencanaan, pelaporan kinerja dan penyajian data BKAD	Penyusunan dokumen perencanaan bkad tepat waktu
									Penyusunan laporan pencapaian realisasi fisik dan keuangan BKAD tepat waktu
									Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan dan program BKAD
								Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan BKAD	Pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan BKAD sesuai dengan peraturan yang berlaku
									Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang, pengelola keuangan, pengelola barang untuk penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu
								Mengoptimalkan teknologi informasi dan social media untuk meningkatkan pelayanan BKAD	Melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan
									Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Kebijakan
								Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyusunan SOP pengelolaan keuangan dan aset daerah, standar pelayanan dan maklumat pelayanan
								Meningkatkan pelayanan kesekretariatan	Membuat dan mengelola dokumen penjagaan kepegawaian
									Fasilitasi hak-hak kepegawaian
									Fasilitasi penyediaan sarana kerja dan pemeliharaan
									Pengelolaan dokumen dan arsip BKAD
								Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan prima di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah	Melakukan analisis kebutuhan diklat dan workshop
									Meningkatkan kualitas pelayanan penyajian data melalui website
		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indek pengelolaan keuangan daerah	B	Meningkatkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indek pengelolaan keuangan daerah	B	Meningkatkan tatakelola proses penyusunan APBD	Menyusun dokumen APBD tepat waktu yang didukung dengan petunjuk pelaksanaan dan standar penyusunan

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Kebijakan
									Mengeluarkan instruksi anggaran dan menyusun jadwal pencermatan
									Meningkatkan koordinasi antara pokja dengan DPRD, Pemprov dan Pemerintah Pusat
									Mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan tatakelola penyusunan APBD
								Meningkatkan tatakelola penatausahaan keuangan daerah	Menganalisis kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen perbendaharaan daerah yang terdiri dari analisis dokumen permohonan dana dari SKPD (SPM/SPP)
									Penerbitan SPD dan SP2D
									Mengoptimalkan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan penatausahaan keuangan daerah
									Konfirmasi dan sinkronisasi pencairan dana (SP2D) dengan Bank Kasda siap saat

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Kebijakan
									Rekapitulasi pajak penghasilan setiap bulan (SPT Masa) dan tahunan (SPT tahunan)
									Meningkatkan koordinasi dengan DJPK, BPJS dan PT. Taspen dan Bank Kasda
									Pelaporan penyerapan dana transfer
									Verifikasi dokumen kontrak
									Meningkatkan pengelolaan uang kas daerah
									Meningkatkan pengelolaan dana hibah dan bansos meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi
									Peningkatan pengelolaan dana penguatan modal

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Kebijakan
								Meningkatkan proses dan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah	Verifikasi dan validasi SPJ
									Penerapan prosedur akuntansi dan pelaporan BKAD
									Pengiriman SPJ dari Perangkat Daerah tepat waktu
									Meningkatkan koordinasi untuk meminimalisasi kesalahan SPJ
									Pendampingan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah
									Pemantauan pelaksanaan dan evaluasi penerapan accrual basis
									Penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD, Laporan Keuangan Daerah dan Laporan realisasi APBD tepat waktu

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Kebijakan
									Akurasi data realisasi APBD yang berasal dari APBD
									Meningkatkan koordinasi intensif dengan inspektorat dan BPK untuk meraih dan mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah
								Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang berbasis accrual
								Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penyusunan draf regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan legal drafting yang berlaku
									Penyampaian aturan baru atau perubahan aturan tentang pengelolaan keuangan dan aset kepada pemangku kepentingan pengelolaan keuangan dan aset daerah
								Meningkatkan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah	Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan pengelola BLUD
								Meningkatkan tatakelola penatausahaan aset daerah	Penyusunan dokumen rencana pengadaan

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Kebijakan
									Penyusunan dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah
									Pendistribusian barang hasil pengadaan sesuai SKPD yang mengusulkan
									Inventarisasi dan rekonsiliasi barang milik daerah termasuk sediaan
									Penelusuran dan penyelesaian status aset daerah (kendaraan, tanah dan bangunan)
									Pengamanan barang milik daerah
									Peningkatan manajemen aset dan Pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen aset daerah
									Melaksanakan proses penghapusan aset sesuai usulan SKPD
									Memfasilitasi pemeliharaan aset daerah (kendaraan dan bangunan)

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Kebijakan
									Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga
								Menyempurnakan prosedur dan standar operasional untuk memberikan kepastian pelayanan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak	Penerapan peraturan pusat tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya
									Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi secara tepat waktu dan jumlah
								Intensifikasi PAD	Melakukan sosialisasi tentang peraturan pajak dan retribusi daerah
									Melakukan pemantauan dan pembinaan wajib pajak daerah
									Menyusun kajian potensi pajak daerah
									Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Kebijakan
									Pembayaran pajak panutan
									Melakukan penelitian SSPD dan BPHTB
									Mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi data, kemudahan dan kecepatan pelayanan
								Ekstensifikasi Pajak Daerah	Melakukan pendaftaran wajib pajak baru
									Kerjasama dengan instansi yang memiliki kewenangan perijinan untuk integrasi data
								Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah	Up date sistem pengelolaan pendapatan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah
									Peningkatan kompetensi petugas pajak daerah
									Melakukan pemutakhiran data subjek pajak dan objek pajak secara periodik

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Kebijakan
								Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dikelola BKAD	Memfasilitasi pemanfaatan aset daerah oleh masyarakat
									Pemeliharaan aset daerah

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						0	0	0	
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	0	0	
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Perubahan Renja 2021 DPA 2022 DPPA 2021 Renja 2022 Renstra RKA 2022 RKA Perubahan 2021 RPK 2022 RUP 2021	Dokumen Perubahan Renja 2021 DPA 2022 DPPA 2021 Renja 2022 Renstra RKA 2022 RKA Perubahan 2021 RPK 2022 RUP 2021	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	0	0	
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	BAST sesuai hasil pelaksanaan tahun n-1 Dokumen dalev terhadap hasil renja Dokumen dalev terhadap hasil renstra Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja Dokumen evaluasi terhadap kebijakan renja	BAST sesuai hasil pelaksanaan tahun n-1 Dokumen dalev terhadap hasil renja Dokumen dalev terhadap hasil renstra Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja Dokumen evaluasi terhadap kebijakan renja	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	0	0	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan capaian indikator sasaran kinerja per triwulan dalam e Sakip Laporan tahunan n-1 LKJIP n-1 Perjanjian kinerja	Laporan capaian indikator sasaran kinerja per triwulan dalam e Sakip Laporan tahunan n-1 LKJIP n-1 Perjanjian kinerja	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	0	0	
		Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan						0	0	0	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan pegawai insentif upah pungut pajak Insentif upah pungut retribusi Tunjangan perbaikan penghasilan	Gaji dan tunjangan pegawai insentif upah pungut pajak Insentif upah pungut retribusi Tunjangan perbaikan penghasilan	83 pegawai 12 bulan 12 bulan 12 bulan	83 pegawai 12 bulan 12 bulan 12 bulan	83 pegawai 12 bulan 12 bulan 12 bulan	0	0	0	
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Bantuan keuangan dan kebutuhan masyarakat DOKumen laporan aset/BMD semester I dan II Dokumen laporan keuangan semester I dan II Verifikasi tagihan PJU	Bantuan keuangan dan kebutuhan masyarakat DOKumen laporan aset/BMD semester I dan II Dokumen laporan keuangan semester I dan II Verifikasi tagihan PJU	12 bulan 2 Dokumen 2 Dokumen 12 bulan	12 bulan 2 Dokumen 2 Dokumen 12 bulan	12 bulan 2 Dokumen 2 Dokumen 12 bulan	0	0	0	
		Administrasi Umum	Administrasi Umum						0	0	0	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan Fungisasi arsip Pengelolaan arsip aktif dan in aktif Pengelolaan surat secara online Penilaian arsip yang diusulkan Updating database buku dan dokumen	Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan Fungisasi arsip Pengelolaan arsip aktif dan in aktif Pengelolaan surat secara online Penilaian arsip yang diusulkan Updating database buku dan dokumen	2 berkas 1 kali 12 bulan 12 bulan 2 berkas 12 bulan	2 berkas 1 kali 12 bulan 12 bulan 2 berkas 12 bulan	2 berkas 1 kali 12 bulan 12 bulan 2 berkas 12 bulan	0	0	0	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langaanan listrik dan PJU Langganan air Langganan telepon	Langaanan listrik dan PJU Langganan air Langganan telepon	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	0	0	0	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penghias ruangan	Penghias ruangan	1 paket	1 paket	1 paket	0	0	0	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tunjangan pengelola anggaran, bendahara dan pembantu bendahara Tunjangan pengelola barang	Tunjangan pengelola anggaran, bendahara dan pembantu bendahara Tunjangan pengelola barang	10 orang 16 orang	10 orang 16 orang	10 orang 16 orang	0	0	0	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan jasa keamanan Penyediaan jasa kebersihan	Penyediaan jasa keamanan Penyediaan jasa kebersihan	1 penyedia 1 penyedia	1 penyedia 1 penyedia	1 penyedia 1 penyedia	0	0	0	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan ATK	Penyediaan ATK	3 paket	3 paket	3 paket	0	0	0	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan jilid Penggandaan	Cetak dan jilid Penggandaan	10 jenis 10000 lembar	10 jenis 10000 lembar	10 jenis 10000 lembar	0	0	0	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronika	alat listrik dan elektronika	12 bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	0	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minm rapat Makan minum tamu	Makan minm rapat Makan minum tamu	40 kali 30 kali	40 kali 30 kali	40 kali 30 kali	0	0	0	
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	50 kali 30 kali	50 kali 30 kali	50 kali 30 kali	0	0	0	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4	Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4	25 unit 3 unit	25 unit 3 unit	25 unit 3 unit	0	0	0	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan komputer Pengadaan PC dan laptop	Pengadaan komputer Pengadaan PC dan laptop	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	0	0	0	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Penataan ruangan Penataan taman Pengadaan gudang Pengecatan gedung Pengecatan pagar	Penataan ruangan Penataan taman Pengadaan gudang Pengecatan gedung Pengecatan pagar	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 400 m2	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 400 m2	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 400 m2	0	0	0	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembelian BBM Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 4	Pembelian BBM Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 4	85116 liter 28 unit 16 unit	85116 liter 28 unit 16 unit	85116 liter 28 unit 16 unit	0	0	0	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan AC Pemeliharaan laptop, komputer, CCTV, Tab Pemeliharaan mesin ketik Pemeliharaan mesin porforasi Pemeliharaan printer	Pemeliharaan AC Pemeliharaan laptop, komputer, CCTV, Tab Pemeliharaan mesin ketik Pemeliharaan mesin porforasi Pemeliharaan printer	20 unit 54 unit 7 unit 3 unit 10 unit	20 unit 54 unit 7 unit 3 unit 10 unit	20 unit 54 unit 7 unit 3 unit 10 unit	0	0	0	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						0	0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						0	0	0	
		Penyusunan KUA dan PPAS	Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA tahun 2022 Dokumen minat baseline verifikasi dan pengajuan emburse dana hibah sanitasi Dokumen minat baseline, verifikasi dan pengajuan reimburse hibah air minum Dokumen Perubahan KUA tahun 2021 Dokumen Perubahan PPAS Tahun 2021 Dokumen PPAS 2022 Survey baseline dan verifikasi hibah air minum Survey baseline dan verifikasi hibah sanitasi	Dokumen KUA tahun 2022 Dokumen minat baseline verifikasi dan pengajuan emburse dana hibah sanitasi Dokumen minat baseline, verifikasi dan pengajuan reimburse hibah air minum Dokumen Perubahan KUA tahun 2021 Dokumen Perubahan PPAS Tahun 2021 Dokumen PPAS 2022 Survey baseline dan verifikasi hibah air minum Survey baseline dan verifikasi hibah sanitasi	1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 kali 2 kali	1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 kali 2 kali	1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 kali 2 kali	0	0	0	
		Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	DPPA APBD 2021 Revisi DPA APBD 2021 Tersedianya DPA APBD TA 2021	DPPA APBD 2021 Revisi DPA APBD 2021 Tersedianya DPA APBD TA 2021	510 DPA 50 Dokumen 510 DPA	510 DPA 50 Dokumen 510 DPA	510 DPA 50 Dokumen 510 DPA	0	0	0	

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Anggaran KAS APBD 2021 Anggaran Kas Perubahan APBD 2021 Belanja jilid nota keuangan APBD 2022 belanja Jilid pengatas nota keuangan APBD 2022 Belanja jlid jawaban PU Fraksi APBD 2022 Jawaban PU raksi PDRD Perubahan 2021 Lampiran 3-4 Hibah Bansos APBD 2022 Laporan 3-4 Hibah Bansos Perubahan APBD 2021 Nota Keuangan Perubahan APBD 2021 Nota Pengantar Keuangan perubahan APBD 2021 Perbup APBD 2022 Perbup Perubahan APBD 2021 Perda APBD 2022 Perda Perubahan APBD 2021 Rancangan Perbup APBD 2021 Rancangan Perbup Perubahan APBD 2021 Rancangan Perda APBD 2022 Rancangan Perda Perubahan APBD 2021 Revisi Perbup APBD 2021 Revisi Perbup Perubahan APBD 2021 SPD APBD 2021 SPD Perubahan APBD 2021	Anggaran KAS APBD 2021 Anggaran Kas Perubahan APBD 2021 Belanja jilid nota keuangan APBD 2022 belanja Jilid pengatas nota keuangan APBD 2022 Belanja jlid jawaban PU Fraksi APBD 2022 Jawaban PU raksi PDRD Perubahan 2021 Lampiran 3-4 Hibah Bansos APBD 2022 Laporan 3-4 Hibah Bansos Perubahan APBD 2021 Nota Keuangan Perubahan APBD 2021 Nota Pengantar Keuangan perubahan APBD 2021 Perbup APBD 2022 Perbup Perubahan APBD 2021 Perda APBD 2022 Perda Perubahan APBD 2021 Rancangan Perbup APBD 2021 Rancangan Perbup Perubahan APBD 2021 Rancangan Perda APBD 2022 Rancangan Perda Perubahan APBD 2021 Revisi Perbup APBD 2021 Revisi Perbup Perubahan APBD 2021 SPD APBD 2021 SPD Perubahan APBD 2021	5 Dokumen 5 okumenD 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 Buku 85 buku 85 Buku 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 50 buku 50 buku 5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 okumenD 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 Buku 85 buku 85 Buku 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 50 buku 50 buku 5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 okumenD 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 buku 85 Buku 85 buku 85 Buku 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 50 buku 50 buku 5 Dokumen 5 Dokumen	0	0	0	
		Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Analisis standar belanja Appraisal tunjangan perumahan DPRD Kajian perjalanan dinas Kajian tunjangan transportasi SHBJ 2022	Analisis standar belanja Appraisal tunjangan perumahan DPRD Kajian perjalanan dinas Kajian tunjangan transportasi SHBJ 2022	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	0	0	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	DOKumen pajak rokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dokumen pemanfaatan DBH Cukai tembakau Laporan posisi kas bulanan Perbup tentang Juklak pengelolaan keuangan daerah Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil Ringkasan realisasi bulanan	DOKumen pajak rokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dokumen pemanfaatan DBH Cukai tembakau Laporan posisi kas bulanan Perbup tentang Juklak pengelolaan keuangan daerah Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil Ringkasan realisasi bulanan	2 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	0	0	0	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						0	0	0	
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan rekonsiliasi Bank Nota debit pengembalian penerimaan Perjanjian pengelolaan idle cash	Laporan rekonsiliasi Bank Nota debit pengembalian penerimaan Perjanjian pengelolaan idle cash	12 bulan 1 Dokumen 6 Perjanjian	12 bulan 1 Dokumen 6 Perjanjian	12 bulan 1 Dokumen 6 Perjanjian	0	0	0	
		Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan penggunaan dana transfer Pencairan dana transfer propinsi Pencairan dana transfer pusat	Pelaporan penggunaan dana transfer Pencairan dana transfer propinsi Pencairan dana transfer pusat	4 kali 4 kali 4 kali	4 kali 4 kali 4 kali	4 kali 4 kali 4 kali	0	0	0	
		Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Aplikasi SP2D Online Penelitian SPM Penerbitan SP2D	Aplikasi SP2D Online Penelitian SPM Penerbitan SP2D	1 Perangkat 1200 SPM 1200 SP2D	1 Perangkat 1200 SPM 1200 SP2D	1 Perangkat 1200 SPM 1200 SP2D	0	0	0	
		Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Dokumen rekapitulasi gaji PNS Pencetakan Data Gaji PNS Pencetakan kesanggupan bayar Pencetakan surat keterangan pemberhentian penghasilan (SKPP) Pencetakan susulan gaji, kekurangan gaji dan terusan gaji Peremajaan Data Gaji	Dokumen rekapitulasi gaji PNS Pencetakan Data Gaji PNS Pencetakan kesanggupan bayar Pencetakan surat keterangan pemberhentian penghasilan (SKPP) Pencetakan susulan gaji, kekurangan gaji dan terusan gaji Peremajaan Data Gaji	127 SKPD 127 Set 15 Berkas 600 SKPP 49 SKPD 127 SKPD	127 SKPD 127 Set 15 Berkas 600 SKPP 49 SKPD 127 SKPD	127 SKPD 127 Set 15 Berkas 600 SKPP 49 SKPD 127 SKPD	0	0	0	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Gaji Pegawai ke DJPK, PT Taspen, BPJS Kesehatan Pembinaan Pengelola Gaji Sosialisasi Revisi Buku pedoman pengelolaan gaji Sosialisasi SPT Masa dan SPTTahunanPPh 21	Laporan Gaji Pegawai ke DJPK, PT Taspen, BPJS Kesehatan Pembinaan Pengelola Gaji Sosialisasi Revisi Buku pedoman pengelolaan gaji Sosialisasi SPT Masa dan SPTTahunanPPh 21	9000 Pegawai 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji	9000 Pegawai 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji	9000 Pegawai 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji	0	0	0	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Berita acara rekonsiliasi SP2D	Berita acara rekonsiliasi SP2D	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						0	0	0	
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan penerimaan Pembinaan pengelola keuangan SK Bendahara dan perubahannya Validasi pendapatan dan belanja SKPD	Laporan penerimaan Pembinaan pengelola keuangan SK Bendahara dan perubahannya Validasi pendapatan dan belanja SKPD	24 laporan 2 kali 7 SK 177 OPD	24 laporan 2 kali 7 SK 177 OPD	24 laporan 2 kali 7 SK 177 OPD	0	0	0	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan keuangan daerah LRA Perbup Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Laporan keuangan daerah LRA Perbup Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	0	0	
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Integrasi sistem Pengembangan modul pelaporan keuangan Pengembangan modul penatausahaan Pengembangan modul perencanaan dan penganggaran	Integrasi sistem Pengembangan modul pelaporan keuangan Pengembangan modul penatausahaan Pengembangan modul perencanaan dan penganggaran	1 software 1 software 1 software 1 software	1 software 1 software 1 software 1 software	1 software 1 software 1 software 1 software	0	0	0	
		Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Bintek Pendampingan	Bintek Pendampingan	2 kali 4 kali	2 kali 4 kali	2 kali 4 kali	0	0	0	
		Kegiatan Penunjang Urusan	Kegiatan Penunjang Urusan						0	0	0	
		Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Bagi hasil pemerintah desa Bagi hasil retribusi bagi pemerintah desa Bagi hasil retribusi wisata Belanja tak terduga Distribusi BKK Desa Distribusi BKK PIlkades Distribusi dana desa dari APBN Sharing pembangunan IPAL	Bagi hasil pemerintah desa Bagi hasil retribusi bagi pemerintah desa Bagi hasil retribusi wisata Belanja tak terduga Distribusi BKK Desa Distribusi BKK PIlkades Distribusi dana desa dari APBN Sharing pembangunan IPAL	86 Desa 86 Desa 15 Desa 1 BTT 86 Desa 35 Desa 86 Desa 1 paket	86 Desa 86 Desa 15 Desa 1 BTT 86 Desa 35 Desa 86 Desa 1 paket	86 Desa 86 Desa 15 Desa 1 BTT 86 Desa 35 Desa 86 Desa 1 paket	0	0	0	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						0	0	0	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah						0	0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Standar kebutuhan Kab Sleman	Standar kebutuhan Kab Sleman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBMD 2022 Penersertifikatan tanah	Dokumen RKBMD 2022 Penersertifikatan tanah	1 Dokumen 10 sertifikat	1 Dokumen 10 sertifikat	1 Dokumen 10 sertifikat	0	0	0	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan hasil evaluasi Laporan penyelesaian barang hilang Rekon aset tetap Rekon persediaan	Laporan hasil evaluasi Laporan penyelesaian barang hilang Rekon aset tetap Rekon persediaan	2 laporan 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	2 laporan 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	2 laporan 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	0	0	0	
		Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Laporan pemanfaatan aset Perbaikan barang milik daerah sesuai kewenangan	Laporan pemanfaatan aset Perbaikan barang milik daerah sesuai kewenangan	1 Dokumen 1 Dkkumen	1 Dokumen 1 Dkkumen	1 Dokumen 1 Dkkumen	0	0	0	
		Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pengadaan software pemanfaatan aset daerah pengelolaan aset daerah	Pengadaan software pemanfaatan aset daerah pengelolaan aset daerah	1 aplikasi 3 jenis	1 aplikasi 3 jenis	1 aplikasi 3 jenis	0	0	0	
		Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Penghapusan aset tetap	Penghapusan aset tetap	3 jenis	3 jenis	3 jenis	0	0	0	
		Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan pengelola barang daerah Penyempurnaan SIDIAN Penyempurnaan SIM aset	Pembinaan pengelola barang daerah Penyempurnaan SIDIAN Penyempurnaan SIM aset	2 kali 1 paket 1 paket	2 kali 1 paket 1 paket	2 kali 1 paket 1 paket	0	0	0	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						0	0	0	
		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah						0	0	0	
		Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Dokumen evaluasi target dan penerimaan PAD	Dokumen evaluasi target dan penerimaan PAD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bahan perhitungan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Intensifikasi penagihan PBB P2 di 86 desa Laporan realisasi pajak daerah Lepaoran perkembangan piutang pajak daerah Pemanggilan wp daerah Pembayaran PBB P2 Panutan Pemberian penghargaan lunas PBB P2 Pemberian penghargaan lunas PBB P2 Pemberian penghargaan lunas PBB P2 Studi orientasi peningkatan PBB P2 86 Desa	Bahan perhitungan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Intensifikasi penagihan PBB P2 di 86 desa Laporan realisasi pajak daerah Lepaoran perkembangan piutang pajak daerah Pemanggilan wp daerah Pembayaran PBB P2 Panutan Pemberian penghargaan lunas PBB P2 Pemberian penghargaan lunas PBB P2 Pemberian penghargaan lunas PBB P2 Studi orientasi peningkatan PBB P2 86 Desa	3 Dokumen 172 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 18 kali 180 WP 5 Kec 29 Desa 500 Dukuh 3 kali	3 Dokumen 172 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 18 kali 180 WP 5 Kec 29 Desa 500 Dukuh 3 kali	3 Dokumen 172 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 18 kali 180 WP 5 Kec 29 Desa 500 Dukuh 3 kali	0	0	0	
		Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dokumen kajian potensi pajak dan retribusi daerah	Dokumen kajian potensi pajak dan retribusi daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	
		Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Surat Ketetapan pajak daerah	Surat Ketetapan pajak daerah	24250 SKPD	24250 SKPD	24250 SKPD	0	0	0	
		Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Sosialisasi paket regulasi tentang pajak daerah	Sosialisasi paket regulasi tentang pajak daerah	8 kali	8 kali	8 kali	0	0	0	
		Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Kajian pengelolaan tentang BPHTB Laporan hasil penelitian kantor dan lapangan Validasi SSPD BPHTB	Kajian pengelolaan tentang BPHTB Laporan hasil penelitian kantor dan lapangan Validasi SSPD BPHTB	1 Dokumen 2000 laporan 13000 OP	1 Dokumen 2000 laporan 13000 OP	1 Dokumen 2000 laporan 13000 OP	0	0	0	
		Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Surat keputusan keberatan, pengurangan keringanan, pnghapusan sanksi administrasi pajak daerah	Surat keputusan keberatan, pengurangan keringanan, pnghapusan sanksi administrasi pajak daerah	500 SK	500 SK	500 SK	0	0	0	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	laporan data wajib pajak Pelayanan wajib pajak Wajib pajak baru	laporan data wajib pajak Pelayanan wajib pajak Wajib pajak baru	6 jenis 12 bulan 600 wp	6 jenis 12 bulan 600 wp	6 jenis 12 bulan 600 wp	0	0	0	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Administrasi PBB Analisis data PBB P2 Cetak SPPT PBB P2 Pemantauan dan evaluasi penyampaian SPPT PBB P2 Pemuthakiran dan pemeliharaan aplikasi Pemuthakiran data PBB Penyampaian SPPT PBB yang diterbitkan secara masal Penyusunan SK Bupati tentang NJOP PBB P2 2021 SK NJOP Verifikasi SPPT PBB P2	Administrasi PBB Analisis data PBB P2 Cetak SPPT PBB P2 Pemantauan dan evaluasi penyampaian SPPT PBB P2 Pemuthakiran dan pemeliharaan aplikasi Pemuthakiran data PBB Penyampaian SPPT PBB yang diterbitkan secara masal Penyusunan SK Bupati tentang NJOP PBB P2 2021 SK NJOP Verifikasi SPPT PBB P2	86 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPT 34 kali 1 paket 20000 OP 630000 SPT 1 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPT	86 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPT 34 kali 1 paket 20000 OP 630000 SPT 1 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPT	86 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPT 34 kali 1 paket 20000 OP 630000 SPT 1 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPT	0	0	0	
		Pemeriksaan Pajak Daerah	Pemeriksaan Pajak Daerah	Dokumen pemeriksaan WP dan dokumen pemeriksaan KAP	Dokumen pemeriksaan WP dan dokumen pemeriksaan KAP	65 LHP	65 LHP	65 LHP	0	0	0	
		Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemantauan WP Pembinaan WP Verifikasi SPTPD	Pemantauan WP Pembinaan WP Verifikasi SPTPD	80 kali 150 kali 40000 SPTPD	80 kali 150 kali 40000 SPTPD	80 kali 150 kali 40000 SPTPD	0	0	0	
	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						0	0	0	
		Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Pengelolaan Data dan Informasi ASN						0	0	0	
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	BUku penjagaan keaikan gaji berkala Buku penjagaan kenaikan pangkat Laporan penilaian angka kredit Laporan penyelesaian ijin cuti Laporan penyusunan SKP Laporan rekap absensi pegawai Laporan usulan gaji berkala Pelatihan kantor sendiri Pengelolaan ASN Peserta yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya	BUku penjagaan keaikan gaji berkala Buku penjagaan kenaikan pangkat Laporan penilaian angka kredit Laporan penyelesaian ijin cuti Laporan penyusunan SKP Laporan rekap absensi pegawai Laporan usulan gaji berkala Pelatihan kantor sendiri Pengelolaan ASN Peserta yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 kali 12 bulan 15 orang	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 kali 12 bulan 15 orang	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 kali 12 bulan 15 orang	0	0	0	
	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja	100%;20% %	100%;20% %	100%;20% %	63,229,059,572	72,335,878,305	85,560,371,813	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	204,960,000	204,959,750	118,324,750	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perubahan Renja 2021 Renja 2022 Renstra RPK 2022 RUP 2021	Dokumen Perubahan Renja 2021 Renja 2022 Renstra RPK 2022 RUP 2021	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	145,470,000	145,470,000	76,060,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA 2022	RKA 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8,588,750	8,588,750	7,563,750	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKA Perubahan 2021	RKA Perubahan 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,588,750	1,588,725	1,588,725	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA 2022	DPA 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,588,750	1,588,725	1,588,725	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPPA 2021	DPPA 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,588,750	1,588,725	1,588,725	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAST sesuai hasil pelaksanaan tahun n-1 Dokumen dalev terhadap hasil renja Dokumen dalev terhadap hasil renstra Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja Dokumen evaluasi terhadap kebijakan renja Laporan capaian indikator sasaran kinerja per triwulan dalam e Sakip Laporan tahunan n-1 LKJIP n-1 Perjanjian kinerja	BAST sesuai hasil pelaksanaan tahun n-1 Dokumen dalev terhadap hasil renja Dokumen dalev terhadap hasil renstra Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja Dokumen evaluasi terhadap kebijakan renja Laporan capaian indikator sasaran kinerja per triwulan dalam e Sakip Laporan tahunan n-1 LKJIP n-1 Perjanjian kinerja	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	46,135,000	46,134,825	29,934,825	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen laporan keuangan	Dokumen laporan keuangan	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	25,622,206,692	34,152,447,107	34,197,097,107	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan pegawai Insentif upah pungut pajak Insentif upah pungut retribusi Tunjangan perbaikan penghasilan	Gaji dan tunjangan pegawai Insentif upah pungut pajak Insentif upah pungut retribusi Tunjangan perbaikan penghasilan	89 pegawai 12 bulan 12 bulan 12 bulan	89 pegawai 12 bulan 12 bulan 12 bulan	89 pegawai 12 bulan 12 bulan 12 bulan	25,167,460,492	33,147,700,982	33,199,100,982	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tunjangan pengelola anggaran, bendahara dan pembantu bendahara Tunjangan pengelola barang	Tunjangan pengelola anggaran, bendahara dan pembantu bendahara Tunjangan pengelola barang	15 orang 11 orang	15 orang 11 orang	15 orang 11 orang	240,600,000	790,600,000	790,600,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Bantuan keuangan dan kebutuhan masyarakat Dokumen laporan aset/BMD semester I dan II Dokumen laporan keuangan semester I dan II	Bantuan keuangan dan kebutuhan masyarakat Dokumen laporan aset/BMD semester I dan II Dokumen laporan keuangan semester I dan II	12 bulan 2 Dokumen 2 Dokumen	12 bulan 2 Dokumen 2 Dokumen	12 bulan 2 Dokumen 2 Dokumen	214,146,200	214,146,125	207,396,125	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan pengelolaan kepegawaian	Laporan pengelolaan kepegawaian	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	725,076,000	1,005,075,900	798,226,000	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala Buku penjagaan kenaikan pangkat Laporan penilaian angka kredit Laporan penyelesaian ijin cuti Laporan penyusunan SKP Laporan rekapan absensi pegawai Laporan usulan gaji berkala Pengelolaan ASN	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala Buku penjagaan kenaikan pangkat Laporan penilaian angka kredit Laporan penyelesaian ijin cuti Laporan penyusunan SKP Laporan rekapan absensi pegawai Laporan usulan gaji berkala Pengelolaan ASN	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 bulan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 bulan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 bulan	725,076,000	1,005,075,900	798,226,000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan bahan logistik	Penyediaan bahan logistik	Paket	Paket	3 Paket	2,194,777,600	2,194,751,145	1,555,651,834	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronika	alat listrik dan elektronika	12 bulan	12 bulan	12 bulan	63,000,000	62,989,830	132,077,230	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum rapat Penyediaan ATK	Makan minum rapat Penyediaan ATK	40 kali 3 paket	40 kali 3 paket	40 kali 3 paket	734,513,560	734,511,867	737,240,656	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan jilid Penggandaan	Cetak dan jilid Penggandaan	10 jenis 10000 lembar	10 jenis 10000 lembar	11 jenis 10000 lembar	347,264,040	347,263,948	379,313,948	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanann makan minum tamu	Layanann makan minum tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	102,000,000	101,997,500	36,000,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	50 kali 30 kali	50 kali 30 kali	30 kali 15 kali	948,000,000	947,988,000	271,020,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana	Paket	Paket	1 Paket	2,230,000,000	2,529,873,148	9,506,063,528	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Ambulance Roda 2 Roda 4	Kendaraan Ambulance Roda 2 Roda 4	25 unit unit unit	25 unit unit unit	2 unit 12 unit 1 unit	1,730,000,000	2,029,909,620	1,503,600,000	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Fingerprint Furniture Gorden Humidifier Kipas Angin Kursi tunggu Mesin antrian Mesin Foto Copy Mesin potong rumput Parkir Sepeda Motor Pengadaan komputer Pengadaan megaphone Pengadaan PC dan laptop Scanner Sound system Tanah Televisi UPS	Fingerprint Furniture Gorden Humidifier Kipas Angin Kursi tunggu Mesin antrian Mesin Foto Copy Mesin potong rumput Parkir Sepeda Motor Pengadaan komputer Pengadaan megaphone Pengadaan PC dan laptop Scanner Sound system Tanah Televisi UPS	unit paket paket paket Paket Paket paket paket paket paket 1 paket paket 1 paket unit paket paket paket paket	unit paket paket paket Paket Paket paket paket paket paket 1 paket paket 1 paket unit paket paket paket paket	2 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	500,000,000	499,963,528	8,002,463,528	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa peralatan dan mesin lainnya	Penyediaan jasa peralatan dan mesin lainnya	Unit	Unit	54 Unit	30,921,351,280	30,921,347,255	37,981,188,594	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan Fungisasi arsip Pengelolaan arsip aktif dan in aktif Pengelolaan surat secara online Penilaian arsip yang diusulkan Updating database buku dan dokumen	Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan Fungisasi arsip Pengelolaan arsip aktif dan in aktif Pengelolaan surat secara online Penilaian arsip yang diusulkan Updating database buku dan dokumen	2 berkas 1 kali 12 bulan 12 bulan 2 berkas 12 bulan	2 berkas 1 kali 12 bulan 12 bulan 2 berkas 12 bulan	2 berkas 1 kali 12 bulan 12 bulan 2 berkas 12 bulan	257,523,520	257,523,000	142,023,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan listrik dan PJU Langganan air Langganan telepon	Langganan listrik dan PJU Langganan air Langganan telepon	10 bulan 12 bulan 12 bulan	10 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	30,163,235,560	30,163,235,560	37,358,553,600	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penghias ruangan	Penghias ruangan	1 paket	1 paket	1 paket	55,071,200	55,069,300	60,544,300	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa keamanan Penyediaan jasa kebersihan	Penyediaan jasa keamanan Penyediaan jasa kebersihan	1 penyedia 1 penyedia	1 penyedia 1 penyedia	1 penyedia 1 penyedia	445,521,000	445,519,395	420,067,694	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Paket	Paket	1 Paket	1,330,688,000	1,327,424,000	1,403,820,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembelian BBM Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 4	Pembelian BBM Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 4	85116 liter 28 unit 16 unit	85116 liter 28 unit 16 unit	56250 liter 28 unit 16 unit	825,848,000	825,844,000	794,740,000	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan AC Pemeliharaan laptop, komputer, CCTV, Tab Pemeliharaan mesin ketik Pemeliharaan mesin porforasi Pemeliharaan printer Pemliharaan sofa	Pemeliharaan AC Pemeliharaan laptop, komputer, CCTV, Tab Pemeliharaan mesin ketik Pemeliharaan mesin porforasi Pemeliharaan printer Pemliharaan sofa	20 unit 54 unit 7 unit 3 unit 10 unit set	20 unit 54 unit 7 unit 3 unit 10 unit set	22 unit 54 unit 6 unit 3 unit 10 unit 2 set	171,600,000	171,520,000	198,020,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penataan kamar mandi Penataan ruangan Penataan rumah genset Penataan taman Pengecatan gedung	Penataan kamar mandi Penataan ruangan Penataan rumah genset Penataan taman Pengecatan gedung	paket 1 paket paket 1 paket 1 paket	paket 1 paket paket 1 paket 1 paket	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	333,240,000	330,060,000	411,060,000	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase ketepatan waktu dan keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah; persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran ; persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	persentase ketepatan waktu dan keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah; persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran ; persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	100%; 100%; 100 %	100%; 100%; 100 %	100%; 100%; 100 %	263,061,249,538	321,538,701,819	348,105,942,718	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen Anggaran	Dokumen Anggaran	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	4,005,156,800	3,981,635,275	3,156,881,525	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA tahun 2022 Dokumen minat baseline verifikasi dan pengajuan emburse dana hibah sanitasi Dokumen minat baseline, verifikasi dan pengajuan reimburse hibah air minum Dokumen Perubahan KUA tahun 2021 Dokumen Perubahan PPAS Tahun 2021 Dokumen PPAS 2022	Dokumen KUA tahun 2022 Dokumen minat baseline verifikasi dan pengajuan emburse dana hibah sanitasi Dokumen minat baseline, verifikasi dan pengajuan reimburse hibah air minum Dokumen Perubahan KUA tahun 2021 Dokumen Perubahan PPAS Tahun 2021 Dokumen PPAS 2022	1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	615,432,000	592,228,500	284,060,750	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Instruksi Anggaran Instruksi Anggaran Perubahan Penelitian RKA Penelitian RKA Perubahan	Instruksi Anggaran Instruksi Anggaran Perubahan Penelitian RKA Penelitian RKA Perubahan	1 Dokumen 1 Dokumen 46 OPD 46 OPD	1 Dokumen 1 Dokumen 46 OPD 46 OPD	1 Dokumen 1 Dokumen 46 OPD 46 OPD	563,771,000	563,460,000	161,460,000	

**RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
TAHUN 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	DPA 2022	DPA 2022				2,393,222,500	2,393,222,450	2,393,222,450	
				DPPA 2021	DPPA 2021							
				Jawaban PU Fraksi DPRD APBD 2022	Jawaban PU Fraksi DPRD APBD 2022							
				Jawaban PU Fraksi DPRD Perubahan 2021	Jawaban PU Fraksi DPRD Perubahan 2021	510 Dokumen	510 Dokumen	460 Dokumen				
				Lampiran 3-10 Hibah Bansos APBD 2022	Lampiran 3-10 Hibah Bansos APBD 2022	5 Dokumen	5 Dokumen	460 Dokumen				
				Laporan 3-10 Hibah Bansos Perubahan APBD 2021	Laporan 3-10 Hibah Bansos Perubahan APBD 2021	85 buku	85 buku	85 buku				
				Nota keuangan APBD 2022	Nota keuangan APBD 2022	85 buku	85 buku	85 buku				
				Nota Keuangan Perubahan APBD 2021	Nota Keuangan Perubahan APBD 2021	85 buku	85 buku	85 buku				
				Pengantar nota keuangan APBD 2022	Pengantar nota keuangan APBD 2022	85 buku	85 buku	85 buku				
				Pengantar nota Keuangan perubahan APBD 2021	Pengantar nota Keuangan perubahan APBD 2021	85 buku	85 buku	85 buku				
				Perbup APBD 2022	Perbup APBD 2022	85 Buku	85 Buku	85 Buku				
				Perbup Perubahan APBD 2021	Perbup Perubahan APBD 2021	85 buku	85 buku	85 buku				
				Perda APBD 2022	Perda APBD 2022	85 Buku	85 Buku	85 Buku				
				Perda Perubahan APBD 2021	Perda Perubahan APBD 2021	30 buku	30 buku	30 buku				
				Rancangan Perbup APBD 2022	Rancangan Perbup APBD 2022	30 buku	30 buku	30 buku				
				Rancangan Perbup Perubahan APBD 2021	Rancangan Perbup Perubahan APBD 2021	30 buku	30 buku	30 buku				
				Rancangan Perda APBD 2022	Rancangan Perda APBD 2022	50 buku	50 buku	50 buku				
				Rancangan Perda Perubahan APBD 2021	Rancangan Perda Perubahan APBD 2021	50 buku	50 buku	50 buku				
				Revisi Perbup APBD 2021	Revisi Perbup APBD 2021							
				Revisi Perbup Perubahan APBD 2021	Revisi Perbup Perubahan APBD 2021							
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Analisis standar belanja	Analisis standar belanja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	378,262,500	378,255,625	263,669,625	
				Appraisal tunjangan perumahan DPRD	Appraisal tunjangan perumahan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
				Kajian perjalanan dinas	Kajian perjalanan dinas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
				Kajian tunjangan transportasi SHBJ 2022	Kajian tunjangan transportasi SHBJ 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen pajak rokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dokumen pajak rokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku				54,468,800	54,468,700	54,468,700	
				Dokumen pemanfaatan DBH Cukai tembakau	Dokumen pemanfaatan DBH Cukai tembakau	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				
				Laporan posisi kas bulanan	Laporan posisi kas bulanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
				Perbup tentang Juklak pengelolaan keuangan daerah	Perbup tentang Juklak pengelolaan keuangan daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen				
				Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil	Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
				Ringkasan realisasi bulanan	Ringkasan realisasi bulanan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen				

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pelaporan dan realisasi penggunaan dana	Pelaporan dan realisasi penggunaan dana	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	491,162,400	490,653,585	482,145,285	
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan rekonsiliasi Bank Nota debet pengembalian penerimaan Perjanjian pengelolaan idle cash	Laporan rekonsiliasi Bank Nota debet pengembalian penerimaan Perjanjian pengelolaan idle cash	12 bulan 1 Dokumen 6 Perjanjian	12 bulan 1 Dokumen 6 Perjanjian	12 bulan 1 Dokumen 6 Perjanjian	77,562,600	77,439,200	77,439,200	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Aplikasi SP2D Online Penelitian SPM Penerbitan SP2D	Aplikasi SP2D Online Penelitian SPM Penerbitan SP2D	1 Perangkat 1200 SPM 1200 SP2D	1 Perangkat 1200 SPM 1200 SP2D	1 Perangkat 1200 SPM 1200 SP2D	171,455,000	171,250,000	171,250,000	
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Laporan pengembangan dan evaluasi penyertaan modal Rekonsiliasi atas penyertaan modal pada PDAM TirtaSembada, PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dan PT. Bank BPD DIY	Laporan pengembangan dan evaluasi penyertaan modal Rekonsiliasi atas penyertaan modal pada PDAM TirtaSembada, PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dan PT. Bank BPD DIY	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	41,808,800	41,808,800	33,300,500	
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan penggunaan dana transfer Pencairan dana transfer propinsi Pencairan dana transfer pusat	Pelaporan penggunaan dana transfer Pencairan dana transfer propinsi Pencairan dana transfer pusat	4 kali 4 kali 4 kali	4 kali 4 kali 4 kali	4 kali 4 kali 4 kali	20,985,000	20,920,000	20,920,000	
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen rekapitulasi gaji PNS Pencetakan Data Gaji PNS Pencetakan kesanggupan bayar Pencetakan surat keterangan pemberhentian penghasilan (SKPP) Pencetakan susulan gaji, kekurangan gaji dan terusan gaji Peremajaan Data Gaji	Dokumen rekapitulasi gaji PNS Pencetakan Data Gaji PNS Pencetakan kesanggupan bayar Pencetakan surat keterangan pemberhentian penghasilan (SKPP) Pencetakan susulan gaji, kekurangan gaji dan terusan gaji Peremajaan Data Gaji	127 SKPD 127 Set 15 Berkas 600 SKPP 49 SKPD 127 SKPD	127 SKPD 127 Set 15 Berkas 600 SKPP 49 SKPD 127 SKPD	127 SKPD 127 Set 15 Berkas 600 SKPP 49 SKPD 127 SKPD	100,249,000	100,248,885	100,248,885	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Gaji Pegawai ke DJPK, PT Taspen, BPJS Kesehatan Pembinaan Pengelola Gaji Sosialisasi Revisi Buku pedoman pengelolaan gaji Sosialisasi SPT Masa dan SPTTahunanPPh 21	Laporan Gaji Pegawai ke DJPK, PT Taspen, BPJS Kesehatan Pembinaan Pengelola Gaji Sosialisasi Revisi Buku pedoman pengelolaan gaji Sosialisasi SPT Masa dan SPTTahunanPPh 21	9000 Pegawai 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji	9000 Pegawai 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji	9000 Pegawai 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji	31,002,000	31,001,700	31,001,700	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Berita acara rekonsiliasi SP2D	Berita acara rekonsiliasi SP2D	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	48,100,000	47,985,000	47,985,000	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan keuangan daerah	Laporan keuangan daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1,219,342,300	1,219,341,900	628,458,750	
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan penerimaan SK Bendahara dan perubahannya Validasi pendapatan dan belanja SKPD	Laporan penerimaan SK Bendahara dan perubahannya Validasi pendapatan dan belanja SKPD	24 laporan 7 SK 177 OPD	24 laporan 7 SK 177 OPD	24 laporan 7 SK 177 OPD	84,108,800	84,108,750	7,548,750	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan keuangan daerah LRA Perbup Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Laporan keuangan daerah LRA Perbup Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	655,357,500	655,357,450	442,591,950	
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Integrasi sistem Pengembangan modul sistem keuangan	Integrasi sistem Pengembangan modul sistem keuangan	1 software software	1 software software	1 software 1 software	367,636,000	367,635,850	154,003,200	
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pendampingan	Pendampingan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	112,240,000	112,239,850	24,314,850	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan realisasi dana bantuan	Laporan realisasi dana bantuan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	257,345,588,038	315,847,071,059	343,838,457,158	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bagi hasil pemerintah desa Distribusi BKK Desa Distribusi BKK Pilkades Distribusi dana desa dari APBN Kompensasi Dampak Negatif Sharing pembangunan IPAL	Bagi hasil pemerintah desa Distribusi BKK Desa Distribusi BKK Pilkades Distribusi dana desa dari APBN Kompensasi Dampak Negatif Sharing pembangunan IPAL	86 Desa 86 Desa 35 Desa 86 Desa Paket 1 Paket	86 Desa 86 Desa 35 Desa 86 Desa Paket 1 Paket	86 Desa 86 Desa 35 Desa 86 Desa 1 Paket 1 Paket	210,366,291,760	237,806,914,860	245,372,106,650	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belanja tak terduga	Belanja tak terduga	1 BTT	1 BTT	1 BTT	4,000,463,900	25,678,977,199	45,202,628,645	
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bagi hasil pajak bagi pemerintah desa Bagi hasil retribusi bagi pemerintah desa Bagi hasil retribusi desa	Bagi hasil pajak bagi pemerintah desa Bagi hasil retribusi bagi pemerintah desa Bagi hasil retribusi desa	86 Desa 86 Desa 15 Desa	86 Desa 86 Desa 15 Desa	86 Desa 86 Desa 15 Desa	42,978,832,378	52,361,179,000	53,263,721,863	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Level A	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Level A	70 %	70 %	70 %	2,025,009,800	2,024,976,130	2,257,607,980	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen barang milik daerah	Dokumen barang milik daerah	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2,025,009,800	2,024,976,130	2,257,607,980	
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBMD 2022 Pensertifikatan tanah Standar barang milik daerah Standar kebutuhan Kab Sleman	Dokumen RKBMD 2022 Pensertifikatan tanah Standar barang milik daerah Standar kebutuhan Kab Sleman	1 Dokumen 10 sertifikat 1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen 10 sertifikat 1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen 10 sertifikat 1 Dokumen 1 Dokumen	142,623,800	142,623,790	524,566,990	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan hasil evaluasi Laporan penyelesaian barang hilang Rekon aset tetap Rekon persediaan	Laporan hasil evaluasi Laporan penyelesaian barang hilang Rekon aset tetap Rekon persediaan	2 laporan 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	2 laporan 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	2 laporan 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	327,960,000	327,959,925	81,509,925	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan pemanfaatan aset Perbaikan barang milik daerah sesuai kewenangan	Laporan pemanfaatan aset Perbaikan barang milik daerah sesuai kewenangan	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	691,570,000	691,540,550	815,290,550	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pengelolaan aset daerah Penghapusan aset tetap	Pengelolaan aset daerah Penghapusan aset tetap	1 Jenis 3 jenis	1 Jenis 3 jenis	3 Jenis 3 jenis	515,892,800	515,890,700	504,149,750	
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan pengelola barang daerah Penyempurnaan SIDIAN Penyempurnaan SIM aset	Pembinaan pengelola barang daerah Penyempurnaan SIDIAN Penyempurnaan SIM aset	2 kali 1 paket 1 paket	2 kali 1 paket 1 paket	2 kali 1 paket 1 paket	346,963,200	346,961,165	332,090,765	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah; Indeks kepuasan terhadap layanan perpajakan daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah; Indeks kepuasan terhadap layanan perpajakan daerah	31 %; 75 %	31 %; 75 %	31 %; 75 %	17,862,140,400	17,862,125,950	13,449,696,375	
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pelayanan wajib pajak	Pelayanan wajib pajak	Bulan	Bulan	12 Bulan	17,862,140,400	17,862,125,950	13,449,696,375	
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen evaluasi target dan penerimaan PAD	Dokumen evaluasi target dan penerimaan PAD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	80,167,600	0	0	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen kajian potensi pajak dan retribusi daerah	Dokumen kajian potensi pajak dan retribusi daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	102,725,000	102,720,000	57,720,000	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi paket regulasi tentang pajak daerah	Sosialisasi paket regulasi tentang pajak daerah	8 kali	8 kali	8 kali	141,120,000	141,119,800	121,119,800	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Administrasi PBB Analisis data PBB P2 Cetak SPPT PBB P2 Pemantauan dan evaluasi penyampaian SPPT PBB P2 Pemuthakiran dan pemeliharaan aplikasi Pemuthakiran data PBB Penyampaian SPPT PBB yang diterbitkan secara masal Penyusunan SK Bupati tentang NJOP PBB P2 2021 Signature tanda tangan elektronik SK NJOP Verifikasi SPPT PBB P2	Administrasi PBB Analisis data PBB P2 Cetak SPPT PBB P2 Pemantauan dan evaluasi penyampaian SPPT PBB P2 Pemuthakiran dan pemeliharaan aplikasi Pemuthakiran data PBB Penyampaian SPPT PBB yang diterbitkan secara masal Penyusunan SK Bupati tentang NJOP PBB P2 2021 Signature tanda tangan elektronik SK NJOP Verifikasi SPPT PBB P2	86 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT 34 kali 1 paket 20000 OP 630000 SPPT 1 Dokumen paket 1 Dokumen 630000 SPPT	86 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT 34 kali 1 paket 20000 OP 630000 SPPT 1 Dokumen paket 1 Dokumen 630000 SPPT	86 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT 34 kali 1 paket 20000 OP 630000 SPPT 1 Dokumen 1 paket 1 Dokumen 630000 SPPT	2,383,664,000	2,383,663,875	814,718,375	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kajian pengelolaan tentang BPHTB Laporan hasil penelitian kantor dan lapangan Tercapainya target penerimaan BPHTB Validasi SSPD BPHTB	Kajian pengelolaan tentang BPHTB Laporan hasil penelitian kantor dan lapangan Tercapainya target penerimaan BPHTB Validasi SSPD BPHTB	1 Dokumen 2000 laporan 1900000000 rupiah 13000 OP	1 Dokumen 2000 laporan 1900000000 rupiah 13000 OP	1 Dokumen 2000 laporan 1460000000000 rupiah 13000 OP	1,208,995,000	1,208,994,975	628,294,975	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Surat Ketetapan pajak daerah	Surat Ketetapan pajak daerah	24250 SKPD	24250 SKPD	24250 SKPD	293,661,200	293,661,125	294,390,725	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	laporan data wajib pajak Pelayanan wajib pajak Wajib pajak baru	laporan data wajib pajak Pelayanan wajib pajak Wajib pajak baru	6 jenis 12 bulan 600 wp	6 jenis 12 bulan 600 wp	6 jenis 12 bulan 600 wp	604,070,400	604,070,200	606,259,000	
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Pembinaan Wp Verifikasi SPTPD	Pembinaan Wp Verifikasi SPTPD	80 Kali 150 SPTPD	80 Kali 150 SPTPD	150 Kali 3500 SPTPD	0	449,349,875	147,864,000	
		Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Bahan perhitungan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Intensifikasi penagihan PBB P2 di 86 desa Laporan perkembangan piutang pajak daerah Laporan realisasi pajak daerah Pemanggilan wp daerah Pembayaran PBB P2 Panutan Pemberian penghargaan lunas PBB P2 Pemberian penghargaan lunas PBB P2 Pemberian penghargaan lunas PBB P2	Bahan perhitungan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Intensifikasi penagihan PBB P2 di 86 desa Laporan perkembangan piutang pajak daerah Laporan realisasi pajak daerah Pemanggilan wp daerah Pembayaran PBB P2 Panutan Pemberian penghargaan lunas PBB P2 Pemberian penghargaan lunas PBB P2 Pemberian penghargaan lunas PBB P2	3 Dokumen 172 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 18 kali 180 WP 5 Kec 29 Desa 500 Dukuh	3 Dokumen 172 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 18 kali 180 WP 5 Kec 29 Desa 500 Dukuh	3 Dokumen 172 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 18 kali 180 WP 5 Kec 29 Desa 500 Dukuh	10,591,207,000	10,591,207,000	8,698,459,800	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Surat keputusan keberatan, pengurangan keringanan, pnghapusan sanksi administrasi pajak daerah	Surat keputusan keberatan, pengurangan keringanan, pnghapusan sanksi administrasi pajak daerah	500 SK	500 SK	500 SK	44,405,000	44,404,900	39,289,900	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen pemeriksaan WP dan dokumen pemeriksaan KAP	Dokumen pemeriksaan WP dan dokumen pemeriksaan KAP	28 LHP	28 LHP	28 LHP	1,962,775,200	1,962,766,800	1,966,826,000	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Evaluasi Target dan Penerimaan PAD	Dokumen Evaluasi Target dan Penerimaan PAD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	449,350,000	80,167,400	74,753,800	
TOTAL									346,177,459,310	413,761,682,204	449,373,618,886	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Level A	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Level A	70 %	70 %	70 %	0	0	0	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sarana dan Prasarana olahraga dalam kondisi layak	Sarana dan Prasarana olahraga dalam kondisi layak	Unit	Unit	6 Unit	0	0	0	
		Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga	Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga	5 unit	5 unit	5 unit	0	0	0	
	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Level A	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Level A	70 %	70 %	70 %	3,542,000,000	3,541,957,930	3,083,457,000	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sarana dan Prasarana olahraga dalam kondisi layak	Sarana dan Prasarana olahraga dalam kondisi layak	Unit	Unit	6 Unit	3,542,000,000	3,541,957,930	3,083,457,000	
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga	Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga	6 unit	6 unit	6 unit	3,542,000,000	3,541,957,930	3,083,457,000	
TOTAL									3,542,000,000	3,541,957,930	3,083,457,000	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						0	0	0	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						0	0	0	
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Berita acara verifikasi dana penguatan modal Data piutang dana penguatan modal Forum komunikasi DPM Laporan keuangan dana penguatan modal Laporan monitoring DPM Laporan penyelesaian tunggakan dana penguatan modal Pelayanan agunan dan sewa deposit box (SDB) RBA UPT pengelolaan dana penguatan modal Sistem informasi dana penguatan modal SK penetapan penerima dan besaran dana penguatan modal Sosialisasi dana penguatan modal Surat perjanjian pinjaman DPM TARget dana penguatan modal	Berita acara verifikasi dana penguatan modal Data piutang dana penguatan modal Forum komunikasi DPM Laporan keuangan dana penguatan modal Laporan monitoring DPM Laporan penyelesaian tunggakan dana penguatan modal Pelayanan agunan dan sewa deposit box (SDB) RBA UPT pengelolaan dana penguatan modal Sistem informasi dana penguatan modal SK penetapan penerima dan besaran dana penguatan modal Sosialisasi dana penguatan modal Surat perjanjian pinjaman DPM TARget dana penguatan modal	80 BA 9396 piutang 5 kali 1 laporan 1 Laporan 1 laporan 4 SDB 2 Dokumen 1 sistem 480 SK 5 kali 400 perjanjian 400 peminjam	80 BA 9396 piutang 5 kali 1 laporan 1 Laporan 1 laporan 4 SDB 2 Dokumen 1 sistem 480 SK 5 kali 400 perjanjian 400 peminjam	80 BA 9396 piutang 5 kali 1 laporan 1 Laporan 1 laporan 4 SDB 2 Dokumen 1 sistem 480 SK 5 kali 400 perjanjian 400 peminjam	0	0	0	
	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase ketepatan waktu dan keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah; persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran ; persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	persentase ketepatan waktu dan keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah; persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran ; persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	100%; 100%; 100 %	100%; 100%; 100 %	100%; 100%; 100 %	921,400,000	921,400,000	921,400,000	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Laporan dana penguatan modal	Laporan dana penguatan modal	Laporan	Laporan	12 Laporan	921,400,000	921,400,000	921,400,000	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Berita acara verifikasi dana penguatan modal Data piutang dana penguatan modal Laporan dana penguatan modal Laporan keuangan dana penguatan modal Laporan monitoring DPM Laporan penyelesaian tunggakan dana penguatan modal Pelayanan agunan dan sewa deposit box (SDB) Pelayanan informasi RBA UPT pengelolaan dana penguatan modal Sistem informasi dana penguatan modal Surat perjanjian pinjaman DPM	Berita acara verifikasi dana penguatan modal Data piutang dana penguatan modal Laporan dana penguatan modal Laporan keuangan dana penguatan modal Laporan monitoring DPM Laporan penyelesaian tunggakan dana penguatan modal Pelayanan agunan dan sewa deposit box (SDB) Pelayanan informasi RBA UPT pengelolaan dana penguatan modal Sistem informasi dana penguatan modal Surat perjanjian pinjaman DPM	80 BA dan SK 9396 piutang 5 laporan 1 laporan 1 Laporan 1 laporan 4 SDB bulan 2 Dokumen 1 sistem 400 perjanjian	80 BA dan SK 9396 piutang 5 laporan 1 laporan 1 Laporan 1 laporan 4 SDB bulan 2 Dokumen 1 sistem 400 perjanjian	60 BA dan SK 9396 piutang 12 laporan 1 laporan 1 Laporan 1 laporan 4 SDB 4 bulan 2 Dokumen 1 sistem 200 perjanjian	921,400,000	921,400,000	921,400,000	
TOTAL									921,400,000	921,400,000	921,400,000	

Lampiran 3
PENETAPAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2021

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	81	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.300.077.703
						PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH	118.324.750
						PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	76.060.000
						KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.563.750
						KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.588.725
						KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.588.725
						KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	1.588.725
						EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.934.825
						ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	34.223.333.741
						PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	33.214.087.616
						PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	801.850.000
						KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	207.396.125

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	796.626.000
						PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	796.626.000
						ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.670.651.834
						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	132.077.230
						PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	846.240.656
						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	385.313.948
						FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	36.000.000
						PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	271.020.000
						PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8.095.533.484
						PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.503.600.000
						PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	6.591.933.484
						PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	37.991.787.894
						PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	142.023.000
						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	37.358.553.600

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60.544.300
						PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	430.666.994
						PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.403.820.000
						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	794.740.000
						PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	198.020.000
						PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	411.060.000
Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indek pengelolaan keuangan daerah	B	Meningkatkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indek pengelolaan keuangan daerah	B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	359.865.358.190
						KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	3.113.812.775
						KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	240.992.000
						KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	161.460.000
						KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	2.393.222.450
						KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	263.669.625
						PEMBINAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	54.468.700

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						KOORDDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	482.145.285
						KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	77.439.200
						PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	171.250.000
						PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH	33.300.500
						KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	20.920.000
						KOORDINASI, PELAKSANAAN KERJASAMA DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	100.248.885
						KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	31.001.700
						REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	47.985.000
						KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	628.458.750
						KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	7.548.750

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	442.591.950
						PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	154.003.200
						PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	24.314.850
						PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN URUSAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	355.640.941.380
						ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	248.515.171.450
						PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	49.068.048.067
						PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	58.057.721.863
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.507.607.980
						PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.507.607.980
						PENYUSUNAN STANDAR BARANG MILIK DAERAH DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	774.566.990
						PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	81.509.925

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	815.290.550
						OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	504.149.750
						PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	332.090.765
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	13.449.696.375
						PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	13.449.696.375
						ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH.	57.720.000
						PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	121.119.800
						PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	814.718.375
						PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	628.294.975
						PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	294.390.725
						PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	606.259.000
						PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	147.864.000

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						PENAGIHAN PAJAK DAERAH	8.698.459.800
						PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	39.289.900
						PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	1.966.826.000
						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	74.753.800

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
SKPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BULAN DESEMBER TAHUN 2021

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.5.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
5.02.03.2.01.02	PENYUSUNAN STANDAR BARANG MILIK DAERAH DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	774.566.990,00	716.515.732,00	92,51		
		Keluaran :						
		1. Standar kebutuhan Kab Sleman	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		2. Standar barang milik daerah	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		3. Dokumen RKBMD 2022	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		4. Pensertifikatan tanah	sertifikat	10,00	10,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.03.2.01.05	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	81.509.925,00	76.938.573,00	94,39		
		Keluaran :						
		1. Laporan hasil evaluasi	laporan	2,00	2,00	100,00		
		2. Laporan penyelesaian barang hilang	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		3. Rekon aset tetap	Dokumen	12,00	12,00	100,00		
		4. Rekon persediaan	Dokumen	12,00	12,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.03.2.01.07	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	815.290.550,00	767.085.852,00	94,09		
		Keluaran :						
		1. Laporan pemanfaatan aset	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		2. Perbaikan barang milik daerah sesuai kewenangan	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.03.2.01.10	OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	504.149.750,00	461.389.031,00	91,52		
		Keluaran :						
		1. Pengadaan software pemanfaatan aset daerah	aplikasi	1,00	1,00	100,00		
		2. pengelolaan aset daerah	jenis	3,00	3,00	100,00		
		3. Penghapusan aset tetap	jenis	3,00	3,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.03.2.01.13	PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	332.090.765,00	234.394.355,00	70,58		
		Keluaran :						
		1. Pembinaan pengelola barang daerah	kali	2,00	2,00	100,00		
		2. Penyempurnaan SIDIAN	paket	1,00	1,00	100,00		
		3. Penyempurnaan SIM aset	paket	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)							89,98	
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)								100,00
5.02.5.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
5.02.02.2.01.01	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	240.992.000,00	232.865.875,00	96,63		
		Keluaran :						
		1. Dokumen KUA tahun 2022	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		2. Dokumen minat baseline verifikasi dan pengajuan emburse dana hibah sanitasi	Dokumen	4,00	4,00	100,00		
		3. Dokumen minat baseline, verifikasi dan pengajuan reimburse hibah air minum	Dokumen	4,00	4,00	100,00		
		4. Dokumen Perubahan KUA tahun 2021	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		5. Dokumen Perubahan PPAS Tahun 2021	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		6. Dokumen PPAS 2022	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		7. Survey baseline dan verifikasi hibah air minum	kali	2,00	2,00	100,00		
		8. Survey baseline dan verifikasi hibah sanitasi	kali	2,00	2,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							100,00	

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.01.03	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	Masukan :						57,14
		- Dana	Rp.	161.460.000,00	1.791.500,00	1,11		
		Keluaran :						
		1. Instruksi Anggaran	dokumen	1,00	1,00	100,00		
		2. Instruksi Anggaran Perubahan	dokumen	1,00	1,00	100,00		
		3. Penelitian RKA	SKPD	46,00	46,00	100,00		
		4. Penelitian RKA Perubahan	SKPD	46,00	46,00	100,00		
		5. DPPA APBD 2021		0,00	0,00	0,00		
		6. Revisi DPA APBD 2021		0,00	0,00	0,00		
		7. Tersedianya DPA APBD TA 2021		0,00	0,00	0,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.02.02.2.01.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	Masukan :						100,00	
		- Dana	Rp.	2.393.222.450,00	1.208.517.625,00	50,50			
		Keluaran :							
		1. Revisi DPPA 2021	dokumen	50,00	50,00	100,00			
		2. Revisi DPA 2021	dokumen	50,00	50,00	100,00			
		3. DPPA 2021	dokumen	460,00	460,00	100,00			
		4. DPA 2022	dokumen	460,00	460,00	100,00			
		5. Perda APBD 2022	buku	85,00	85,00	100,00			
		6. Perda Perubahan APBD 2021	Buku	85,00	85,00	100,00			
		7. Rancangan Perbup APBD 2021	buku	30,00	30,00	100,00			
		8. Rancangan Perbup Perubahan APBD 2021	buku	30,00	30,00	100,00			
		9. Rancangan Perda APBD 2022	buku	30,00	30,00	100,00			
		10. Rancangan Perda Perubahan APBD 2021	buku	30,00	30,00	100,00			
		11. Revisi Perbup APBD 2021	buku	50,00	50,00	100,00			
		12. Revisi Perbup Perubahan APBD 2021	buku	50,00	50,00	100,00			
		13. SPD APBD 2021	Dokumen	5,00	5,00	100,00			
		14. SPD Perubahan APBD 2021	Dokumen	5,00	5,00	100,00			
		15. Perbup Perubahan APBD 2021	Buku	85,00	85,00	100,00			
		16. Perbup APBD 2022	buku	85,00	85,00	100,00			
		17. Nota Pengantar Keuangan perubahan APBD 2021	buku	85,00	85,00	100,00			
		18. Appraisal tunjangan perumahan DPRD	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		19. Kajian perjalanan dinas	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		20. Kajian tunjangan transportasi	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		21. Analisis standar belanja	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		22. Anggaran KAS APBD 2021	Dokumen	5,00	5,00	100,00			
		23. Anggaran Kas Perubahan APBD 2021	okumenD	5,00	5,00	100,00			
		24. Belanja jilid nota keuangan APBD 2022	buku	85,00	85,00	100,00			
		25. belanja Jilid pengatas nota keuangan APBD 2022	buku	85,00	85,00	100,00			
		26. Belanja jlid jawaban PU Fraksi APBD 2022	buku	85,00	85,00	100,00			
		27. Jawaban PU raksi PDRD Perubahan 2021	buku	85,00	85,00	100,00			
		28. Lampiran 3-4 Hibah Bansos APBD 2022	buku	85,00	85,00	100,00			
		29. Laporan 3-4 Hibah Bansos Perubahan APBD 2021	buku	85,00	85,00	100,00			
		30. Nota Keuangan Perubahan APBD 2021	buku	85,00	85,00	100,00			
		31. SHBJ 2022	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
			Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							100,00

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.01.09	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	263.669.625,00	254.002.425,00	96,33		
		Keluaran :						
		1. Analisis standar belanja	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		2. Appraisal tunjangan perumahan DPRD	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		3. Kajian perjalanan dinas	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		4. Kajian tunjangan transportasi	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		5. SHBJ 2022	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.02.2.01.13	PEMBINAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	54.468.700,00	48.019.650,00	88,16		
		Keluaran :						
		1. DOkumen pajak rokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dokumen	2,00	2,00	100,00		
		2. Dokumen pemanfaatan DBH Cukai tembakau	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		3. Laporan posisi kas bulanan	Dokumen	12,00	12,00	100,00		
		4. Perbup tentang Juklak pengelolaan keuangan daerah	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		5. Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil	Dokumen	12,00	12,00	100,00		
		6. Ringkasan realisasi bulanan	Dokumen	12,00	12,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran								
5.02.02.2.02.01	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	77.439.200,00	64.605.967,00	83,43		
		Keluaran :						
		1. Laporan rekonsiliasi Bank	bulan	12,00	12,00	100,00		
		2. Nota debet pengembalian penerimaan	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		3. Perjanjian pengelolaan idle cash	Perjanjian	6,00	6,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.02.03	PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	171.250.000,00	144.747.500,00	84,52		
		Keluaran :						
		1. Pencairan dana transfer pusat	kali	4,00	4,00	100,00		
		2. Pencairan dana transfer propinsi	kali	4,00	4,00	100,00		
		3. Pelaporan penggunaan dana transfer	kali	4,00	4,00	100,00		
		4. Aplikasi SP2D Online	Perangkat	1,00	1,00	100,00		
		5. Penelitian SPM	SPM	1.200,00	1.200,00	100,00		
		6. Penerbitan SP2D	SP2D	1.200,00	1.200,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							100,00	
5.02.02.2.02.04	PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	33.300.500,00	27.581.775,00	82,83		
		Keluaran :						
		1. Penerbitan SP2D	SP2D	1.200,00	1.200,00	100,00		
		2. Aplikasi SP2D Online	Perangkat	1,00	1,00	100,00		
		3. Laporan pengembangan dan evaluasi penyertaan modal	dokumen	1,00	1,00	100,00		
		4. Rekonsiliasi atas penyertaan modal pada PDAM Tirta Sembada, PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dan PT. Bank BPD DIY	dokumen	1,00	1,00	100,00		
		5. Penelitian SPM	SPM	1.200,00	1.200,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.02.2.02.05	KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	20.920.000,00	20.319.500,00	97,13		
		Keluaran :						
		1. Pencetakan surat keterangan pemberhentian penghasilan (SKPP)	SKPP	600,00	600,00	100,00		
		2. Peremajaan Data Gaji	SKPD	127,00	127,00	100,00		
		3. Pencetakan Data Gaji PNS	Set	127,00	127,00	100,00		
		4. Dokumen rekapitulasi gaji PNS	SKPD	127,00	127,00	100,00		
		5. Pencetakan susulan gaji, kekurangan gaji dan terusan gaji	SKPD	49,00	49,00	100,00		
		6. Pencetakan kesanggupan bayar	Berkas	15,00	15,00	100,00		
		7. Pelaporan penggunaan dana transfer	kali	4,00	4,00	100,00		
		8. Pencairan dana transfer propinsi	kali	4,00	4,00	100,00		
		9. Pencairan dana transfer pusat	kali	4,00	4,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.02.06	KOORDINASI, PELAKSANAAN KERJASAMA DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	100.248.885,00	97.530.500,00	97,29		
		Keluaran :						
		1. Sosialisasi SPT Masa dan SPTTahunanPPh 21	Pengelola	127,00	127,00	100,00		
		2. Pencetakan susulan gaji, kekurangan gaji dan terusan gaji	SKPD	49,00	49,00	100,00		
		3. Pencetakan surat keterangan pemberhentian penghasilan (SKPP)	SKPP	600,00	600,00	100,00		
		4. Pencetakan kesanggupan bayar	Berkas	15,00	15,00	100,00		
		5. Pencetakan Data Gaji PNS	Set	127,00	127,00	100,00		
		6. Dokumen rekapitulasi gaji PNS	SKPD	127,00	127,00	100,00		
		7. Laporan Gaji Pegawai ke DJPK, PT Taspen, BPJS Kesehatan	Pegawai	9.000,00	9.000,00	100,00		
		8. Pembinaan Pengelola Gaji	Pengelola	127,00	127,00	100,00		
		9. Sosialisasi Revisi Buku pedoman pengelolaan gaji	Pengelola	127,00	127,00	100,00		
		10. Peremajaan Data Gaji	SKPD	127,00	127,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							100,00	
5.02.02.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	31.001.700,00	30.011.500,00	96,81		
		Keluaran :						
		1. Laporan Gaji Pegawai ke DJPK, PT Taspen, BPJS Kesehatan	Pegawai	9.000,00	9.000,00	100,00		
		2. Pembinaan Pengelola Gaji	Pengelola	127,00	127,00	100,00		
		3. Sosialisasi Revisi Buku pedoman pengelolaan gaji	Pengelola	127,00	127,00	100,00		
		4. Sosialisasi SPT Masa dan SPTTahunanPPh 21	Pengelola	127,00	127,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.02.2.02.09	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	47.985.000,00	45.668.500,00	95,17		
		Keluaran :						
		1. Berita acara rekonsiliasi SP2D	Dokumen	12,00	12,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							100,00	

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.02.02.2.03.01	KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	Masukan :						100,00	
		- Dana	Rp.	7.548.750,00	2.211.300,00	29,29			
		Keluaran :							
		1. Laporan penerimaan	laporan	24,00	24,00	100,00			
		2. Pembinaan pengelola keuangan	kali	2,00	2,00	100,00			
		3. SK Bendahara dan perubahannya	SK	7,00	7,00	100,00			
		4. Validasi pendapatan dan belanja SKPD	OPD	177,00	177,00	100,00			
		Hasil :							
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							
5.02.02.2.03.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	Masukan :						100,00	
		- Dana	Rp.	442.591.950,00	408.480.150,00	92,29			
		Keluaran :							
		1. Laporan keuangan daerah	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		2. LRA	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		3. Perbup Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		Hasil :							
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							
		5.02.02.2.03.09	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	Masukan :					
- Dana	Rp.			154.003.200,00	149.871.400,00	97,32			
Keluaran :									
1. Integrasi sistem	software			1,00	1,00	100,00			
2. Pengembangan modul pelaporan keuangan	software			1,00	1,00	100,00			
3. Pengembangan modul penatausahaan	software			1,00	1,00	100,00			
4. Pengembangan modul perencanaan dan penganggaran	software			1,00	1,00	100,00			
Hasil :									
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran									
5.02.02.2.03.11	PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Masukan :						100,00	
		- Dana	Rp.	24.314.850,00	11.498.100,00	47,29			
		Keluaran :							
		1. Bimtek	kali	4,00	4,00	100,00			
		2. Pendampingan	kali	4,00	4,00	100,00			
		3. Studi Orientasi	kali	1,00	1,00	100,00			
		Hasil :							
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.04.08	ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	248.515.171.450,00	246.465.171.240,00	99,18		
		Keluaran :						
		1. Bagi hasil pemerintah desa	Desa	86,00	86,00	100,00		
		2. Distribusi BKK Desa	Desa	86,00	86,00	100,00		
		3. Distribusi BKK Pilkades	Desa	35,00	35,00	100,00		
		4. Distribusi dana desa dari APBN	Desa	86,00	86,00	100,00		
		5. Sharing pembangunan IPAL	paket	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.02.2.04.09	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	49.068.048.067,00	27.614.828.647,00	56,28		
		Keluaran :						
		1. Belanja tak terduga	BTT	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.02.2.04.10	PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	58.057.721.863,00	56.580.605.093,00	97,46		
		Keluaran :						
		1. Bagi hasil pemerintah desa	Desa	86,00	86,00	100,00		
		2. Bagi hasil retribusi bagi pemerintah desa	Desa	86,00	86,00	100,00		
		3. Bagi hasil retribusi desa	Desa	15,00	15,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)							92,65	
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)								97,74
5.02.5.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
5.02.04.2.01.02	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH.	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	57.720.000,00	41.955.950,00	72,69		
		Keluaran :						
		1. Dokumen kajian potensi pajak dan retribusi daerah	Dokumen	2,00	2,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran								100,00

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.04.2.01.03	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	121.119.800,00	73.837.800,00	60,96		
		Keluaran :						
		1. Sosialisasi paket regulasi tentang pajak daerah	kali	8,00	8,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.04.2.01.06	PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	Masukan :						96,32
		- Dana	Rp.	814.718.375,00	525.800.700,00	64,54		
		Keluaran :						
		1. Signature tanda tangan elektronik	paket	1,00	1,00	100,00		
		2. Verifikasi SPPT PBB P2	SPPT	630.000,00	630.000,00	100,00		
		3. SK NJOP	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		4. Penyusunan SK Bupati tentang NJOP PBB P2 2021	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		5. Penyampaian SPPT PBB yang diterbitkan secara masal	SPPT	630.000,00	630.000,00	100,00		
		6. Pemuthakiran data PBB	OP	20.000,00	11.894,00	59,47		
		7. Pemuthakiran dan pemeliharaan aplikasi	paket	1,00	1,00	100,00		
		8. Pemantauan dan evaluasi penyampaian SPPT PBB P2	kali	34,00	34,00	100,00		
		9. Cetak SPPT PBB P2	SPPT	630.000,00	630.000,00	100,00		
		10. Analisis data PBB P2	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		11. Administrasi PBB	Dokumen	86,00	86,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran								
5.02.04.2.01.07	PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	628.294.975,00	445.988.200,00	70,98		
		Keluaran :						
		1. Kajian pengelolaan tentang BPHTB	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		2. Laporan hasil penelitian kantor dan lapangan	laporan	2.000,00	2.000,00	100,00		
		3. Validasi SSPD BPHTB	OP	13.000,00	13.000,00	100,00		
		4. Tercapainya target penerimaan BPHTB	rupiah	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran								
5.02.04.2.01.08	PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	294.390.725,00	270.757.400,00	91,97		
		Keluaran :						
		1. Surat Ketetapan pajak daerah	SKPD	24.250,00	24.250,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.04.2.01.09	PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	Masukan :						92,72
		- Dana	Rp.	606.259.000,00	451.257.334,00	74,43		
		Keluaran :						
		1. laporan data wajib pajak	jenis	6,00	6,00	100,00		
		2. Pelayanan wajib pajak	bulan	12,00	12,00	100,00		
		3. Wajib pajak baru	wp	600,00	469,00	78,17		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.04.2.01.10	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	147.864.000,00	144.923.986,00	98,01		
		Keluaran :						
		1. Pemantauan WP	Kali	80,00	80,00	100,00		
		2. Pembinaan WP	Kali	150,00	150,00	100,00		
		3. Verifikasi SPTPD	SPTPD	40.000,00	40.000,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.04.2.01.11	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	8.698.459.800,00	7.094.257.641,00	81,56		
		Keluaran :						
		1. Bahan perhitungan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah	Dokumen	3,00	3,00	100,00		
		2. Intensifikasi penagihan PBB P2 di 86 desa	kali	172,00	172,00	100,00		
		3. Laporan realisasi pajak daerah	Dokumen	12,00	12,00	100,00		
		4. Laporan perkembangan piutang pajak daerah	Dokumen	12,00	12,00	100,00		
		5. Pemanggilan wp daerah	kali	18,00	18,00	100,00		
		6. Pembayaran PBB P2 Panutan	WP	180,00	180,00	100,00		
		7. Pemberian penghargaan lunas PBB P2	Desa	29,00	29,00	100,00		
		8. Pemberian penghargaan lunas PBB P2	Dukuh	500,00	500,00	100,00		
		9. Pemberian penghargaan lunas PBB P2	Kec	5,00	5,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.04.2.01.12	PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	Masukan :						156,80
		- Dana	Rp.	39.289.900,00	33.613.200,00	85,55		
		Keluaran :						
		1. Surat keputusan keberatan, pengurangan keringanan, pnghapusan sanksi administrasi pajak daerah	SK	500,00	784,00	156,80		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.04.2.01.13	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	Masukan :						92,86
		- Dana	Rp.	1.966.826.000,00	1.740.654.901,00	88,50		
		Keluaran :						
		1. Dokumen pemeriksaan WP dan dokumen pemeriksaan KAP	LHP	28,00	26,00	92,86		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.04.2.01.14	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	74.753.800,00	67.068.717,00	89,72		
		Keluaran :						
		1. Dokumen Evaluasi Target dan Penerimaan PAD	Dokumen	12,00	12,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)						80,97	
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)							103,52
5.02.5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
5.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	76.060.000,00	41.461.465,00	54,51		
		Keluaran :						
		1. DPA 2022	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		2. RPK 2022	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		3. Renstra	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		4. Renja 2022	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		5. Dokumen Perubahan Renja 2021	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		6. RUP 2021	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		7. RKA 2022	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		8. DPPA 2021	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		9. RKA Perubahan 2021	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		10. RUP 2021	Dokumen	2,00	2,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran								
5.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	7.563.750,00	5.966.260,00	78,88		
		Keluaran :						
		1. RKA 2022	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran								

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	1.588.725,00	1.543.250,00	97,14		
		Keluaran :						
		1. Dokumen evaluasi terhadap kebijakan renja	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		2. Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		3. Dokumen dalev terhadap hasil renja	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		4. Dokumen dalev terhadap hasil renstra	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		5. BAST sesuai hasil pelaksanaan tahun n-1	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		6. RKA Perubahan 2021	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	1.588.725,00	1.335.355,00	84,05		
		Keluaran :						
		1. DPA 2022	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	1.588.725,00	1.325.925,00	83,46		
		Keluaran :						
		1. LKJIP n-1	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		2. Laporan tahunan n-1	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		3. Laporan capaian indikator sasaran kinerja per triwulan dalam e Sakip	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		4. Perjanjian kinerja	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		5. DPPA 2021	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Masukan :						100,00	
		- Dana	Rp.	29.934.825,00	28.558.320,00	95,40			
		Keluaran :							
		1. BAST sesuai hasil pelaksanaan tahun n-1	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		2. Dokumen dalev terhadap hasil renja	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		3. Dokumen dalev terhadap hasil renstra	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		4. Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		5. Dokumen evaluasi terhadap kebijakan renja	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		6. Laporan capaian indikator sasaran kinerja per triwulan dalam e Sakip	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		7. Laporan tahunan n-1	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		8. LKJIP n-1	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		9. Perjanjian kinerja	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		Hasil :							
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							
5.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Masukan :						100,00	
		- Dana	Rp.	33.214.087.616,00	27.588.246.968,59	83,06			
		Keluaran :							
		1. Gaji dan tunjangan pegawai	pegawai	85,00	85,00	100,00			
		2. insentif upah pungut pajak	bulan	12,00	12,00	100,00			
		3. Insentif upah pungut retribusi	bulan	12,00	12,00	100,00			
		4. Tunjangan perbaikan penghasilan	bulan	12,00	12,00	100,00			
		Hasil :							
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							
		5.02.01.2.02.03	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Masukan :					
- Dana	Rp.			801.850.000,00	543.797.600,00	67,82			
Keluaran :									
1. Tunjangan pengelola anggaran, bendahara dan pembantu bendahara	orang			10,00	10,00	100,00			
2. Tunjangan pengelola barang	orang			16,00	16,00	100,00			
Hasil :									
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran									
5.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	Masukan :						100,00	
		- Dana	Rp.	207.396.125,00	112.034.398,00	54,02			
		Keluaran :							
		1. DOKumen laporan aset/BMD semester I dan II	Dokumen	2,00	2,00	100,00			
		2. Dokumen laporan keuangan semester I dan II	Dokumen	2,00	2,00	100,00			
		3. Bantuan keuangan dan kebutuhan masyarakat	bulan	12,00	12,00	100,00			
		Hasil :							
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran									

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01.2.05.03	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	796.626.000,00	654.626.677,00	82,17		
		Keluaran :						
		1. BUku penjagaan keaikan gaji berkala	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		2. Pengelolaan ASN	bulan	12,00	12,00	100,00		
		3. Pelatihan kantor sendiri	kali	2,00	2,00	100,00		
		4. Laporan usulan gaji berkala	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		5. Laporan rekapan absensi pegawai	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		6. Laporan penyusunan SKP	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		7. Laporan penyelesaian ijin cuti	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		8. Laporan penilaian angka kredit	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		9. Buku penjagaan kenaikan pangkat	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
		10. Peserta yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya	orang	15,00	15,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	132.077.230,00	87.157.182,00	65,99		
		Keluaran :						
		1. alat listrik dan elektronika	bulan	12,00	12,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	846.240.656,00	657.547.910,00	77,70		
		Keluaran :						
		1. Makan minum rapat	kali	40,00	40,00	100,00		
		2. Penyediaan ATK	paket	3,00	3,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran								
5.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	385.313.948,00	175.395.550,00	45,52		
		Keluaran :						
		1. Penggandaan	lembar	10.000,00	10.000,00	100,00		
		2. Cetak dan jilid	jenis	10,00	10,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran								

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	36.000.000,00	34.810.815,00	96,70		
		Keluaran :						
		1. Layanann makan minum tamu	bulan	12,00	12,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Masukan :						133,33
		- Dana	Rp.	271.020.000,00	263.746.071,00	97,32		
		Keluaran :						
		1. Perjalanan dinas luar daerah	kali	30,00	50,00	166,67		
		2. Perjalanan dinas dalam daerah	kali	50,00	50,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran								
5.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	1.503.600.000,00	1.385.089.870,00	92,12		
		Keluaran :						
		1. Kendaraan Ambulance	unit	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	6.591.933.484,00	5.512.125.965,21	83,62		
		Keluaran :						
		1. Pengadaan megaphone	unit	10,00	10,00	100,00		
		2. Fingerprint	unit	2,00	2,00	100,00		
		3. Televisi	Paket	1,00	1,00	100,00		
		4. Mesin Potong Rumput	paket	1,00	1,00	100,00		
		5. UPS	Paket	1,00	1,00	100,00		
		6. Gorden	paket	1,00	1,00	100,00		
		7. Pengadaan komputer	paket	1,00	1,00	100,00		
		8. Pengadaan PC dan laptop	paket	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran								

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	142.023.000,00	85.724.465,00	60,36		
		Keluaran :						
		1. Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan	berkas	2,00	2,00	100,00		
		2. Fungisasi arsip	kali	1,00	1,00	100,00		
		3. Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	bulan	12,00	12,00	100,00		
		4. Pengelolaan surat secara online	bulan	12,00	12,00	100,00		
		5. Penilaian arsip yang diusulkan	berkas	2,00	2,00	100,00		
		6. Updating database buku dan dokumen	bulan	12,00	12,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	37.358.553.600,00	36.334.761.480,00	97,26		
		Keluaran :						
		1. Langganan air	bulan	12,00	12,00	100,00		
		2. Langganan telepon	bulan	12,00	12,00	100,00		
		3. Langganan listrik dan PJU	bulan	9,00	9,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.01.2.08.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	60.544.300,00	41.693.575,00	68,86		
		Keluaran :						
		1. Penghias ruangan	paket	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran								
5.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	430.666.994,00	388.081.270,00	90,11		
		Keluaran :						
		1. Penyediaan jasa kebersihan	penyedia	1,00	1,00	100,00		
		2. Penyediaan jasa keamanan	penyedia	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran								

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	794.740.000,00	370.526.684,00	46,62		
		Keluaran :						
		1. Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	28,00	28,00	100,00		
		2. Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	16,00	16,00	100,00		
		3. Pembelian BBM	liter	85.116,00	85.116,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
5.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	198.020.000,00	119.482.700,00	60,34		
		Keluaran :						
		1. Pemeliharaan Sofa	set	2,00	2,00	100,00		
		2. Pemeliharaan AC	unit	22,00	22,00	100,00		
		3. Pemeliharaan laptop, komputer, CCTV, Tab	unit	54,00	54,00	100,00		
		4. Pemeliharaan mesin ketik	unit	6,00	6,00	100,00		
		5. Pemeliharaan mesin porforasi	unit	3,00	3,00	100,00		
		6. Pemeliharaan printer	unit	10,00	10,00	100,00		
		Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran								
5.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Masukan :						100,00
		- Dana	Rp.	411.060.000,00	280.063.177,99	68,13		
		Keluaran :						
		1. Penataan taman	paket	1,00	1,00	100,00		
		2. Pengecatan gedung	paket	1,00	1,00	100,00		
		3. Penataan ruangan	paket	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)							88,63	
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)							101,39	
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Instansi)							91,56	
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Instansi)							100,66	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
SKPD : UPT PENGELOLAAN STADION MAGUWO HARJO
BULAN DESEMBER TAHUN 2021**

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.5.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
5.02.03.2.01.13	PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Masukan :						
		- Dana	Rp.	3.083.457.000,00	2.649.372.878,00	85,92		
		Keluaran :						
		0. data tidak ada	tidak	0,00	0,00	0,00		
		1. data tidak ada	tidak	0,00	0,00	0,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)						85,92	
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)						0,00	
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Instansi)						85,92		
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Instansi)						0,00		

**SKPD : UPT PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL
BULAN DESEMBER TAHUN 2021**

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.5.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
5.02.02.2.02.08	KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS	Masukan :						
		- Dana	Rp.	921.400.000,00	597.855.221,00	64,89		
		Keluaran :						
		0. data tidak ada	tidak	0,00	0,00	0,00		
		0. data tidak ada	tidak	0,00	0,00	0,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)						64,89	
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)						0,00	
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Instansi)							64,89	
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Instansi)							0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BULAN DESEMBER 2021

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan Daerah				
41	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	561.802.391.631,00	576.132.949.728,74	14.330.558.097,74	102,55
4101	Pajak Daerah	488.190.000.000,00	511.407.257.119,00	23.217.257.119,00	104,76
4102	Retribusi Daerah	1.709.365.000,00	1.648.443.281,00	(60.921.719,00)	96,44
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.726.973.911,00	38.164.197.265,08	(562.776.645,92)	98,55
4104	Lain-lain PAD yang Sah	33.176.052.720,00	24.913.052.063,66	(8.263.000.656,34)	75,09
42	Pendapatan Transfer	1.920.006.358.908,00	1.857.821.213.366,50	(62.185.145.541,50)	96,76
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.496.500.015.956,00	1.403.594.028.179,00	(92.905.987.777,00)	93,79
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	423.506.342.952,00	454.227.185.187,50	30.720.842.235,50	107,25
43	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.654.102.299,00	21.271.452.549,00	14.617.350.250,00	319,67
4301	Pendapatan Hibah	6.654.102.299,00	10.920.677.000,00	4.266.574.701,00	164,12
4302	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10.350.775.549,00	10.350.775.549,00	100,00
	Jumlah Pendapatan	2.488.462.852.838,00	2.455.225.615.644,24	(33.237.237.193,76)	98,66
5	Belanja Daerah				
51	Belanja Operasi	100.771.888.994,00	86.512.116.311,58	(14.259.772.682,42)	85,85
5101	Belanja Pegawai	33.999.327.616,00	28.117.641.168,59	(5.881.686.447,41)	82,70
5102	Belanja Barang dan Jasa	65.672.561.378,00	58.394.475.142,99	(7.278.086.235,01)	88,92
5103	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	Belanja Hibah	1.100.000.000,00	0,00	(1.100.000.000,00)	0,00
5106	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Modal	8.814.766.874,00	7.344.377.360,21	(1.470.389.513,79)	83,32
5201	Belanja Modal Tanah	3.650.000.000,00	2.867.055.000,00	(782.945.000,00)	78,55
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.515.857.784,00	3.922.717.360,21	(593.140.423,79)	86,87
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	184.000.000,00	162.060.000,00	(21.940.000,00)	88,08
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	464.909.090,00	392.545.000,00	(72.364.090,00)	84,43
53	Belanja Tidak Terduga	49.068.048.067,00	27.614.828.647,00	(21.453.219.420,00)	56,28
5301	Belanja Tidak Terduga	49.068.048.067,00	27.614.828.647,00	(21.453.219.420,00)	56,28
54	Belanja Transfer	305.472.893.313,00	192.489.416.333,00	(112.983.476.980,00)	63,01
5401	Belanja Bagi Hasil	58.057.721.863,00	56.580.605.093,00	(1.477.116.770,00)	97,46
5402	Belanja Bantuan Keuangan	247.415.171.450,00	135.908.811.240,00	(111.506.360.210,00)	54,93
	Jumlah Belanja	464.127.597.248,00	313.960.738.651,79	(150.166.858.596,21)	67,65
	Surplus/(Defisit)	2.024.335.255.590,00	2.141.264.876.992,45	116.929.621.402,45	105,78
6	Pembiayaan Daerah				
61	Penerimaan Pembiayaan	380.553.060.068,01	380.545.812.168,92	(7.247.899,09)	100,00
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	380.553.060.068,01	380.545.812.168,92	(7.247.899,09)	100,00
6102	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6103	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6104	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	380.553.060.068,01	380.545.812.168,92	(7.247.899,09)	100,00
62	Pengeluaran Pembiayaan	14.096.000.000,00	14.096.000.000,00	0,00	100,00
6201	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6202	Penyertaan Modal Daerah	14.096.000.000,00	14.096.000.000,00	0,00	100,00
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
6204	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
6205	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	14.096.000.000,00	14.096.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIYAAN NETTO	366.457.060.068,01	366.449.812.168,92	(7.247.899,09)	100,00



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **HARIS SUTARTA SE, MT**
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SRI PURNOMO**
Jabatan : **BUPATI SLEMAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 4 Januari 2021



Pihak Kedua

SRI PURNOMO



Pihak Pertama

HARIS SUTARTA SE, MT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator RPJMD Yang Didukung	Target				Rumus Perhitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Predikat LAKIP	Predikat LAKIP Kabupaten		84,5			Predikat Hasil Evaluasi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat				79	Jumlah Nilai IKM dari semua OPD dan UPT dibagi Jumlah OPD dan UPT
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP				Opini BPK
		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	Jumlah Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 100%
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah				27,5%	Realisasi PAD dibagi Realisasi Pendapatan Daerah dikalikan 100 %
5	Realisasi Investasi pada BUMD	Realisasi Investasi pada BUMD	Realisasi Investasi pada BUMD	100%	100%	100%	100%	Jumlah Realisasi Investasi BUMD dibagi Jumlah Rencana Investasi BUMD dikali 100 %

Program

Anggaran

Keterangan

1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72,335,878,305.00
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	322,460,101,819.00
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5,566,934,060.00
4	Pengelolaan Pendapatan Daerah	17,862,125,950.00



Sleman, 4 Januari 2021

Kepala BKAD Kab. Sleman

HARIS SUTARTA SE, MT
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19640831 199303 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **HARIS SUTARTA SE, MT**

Jabatan : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSTINI SRI PURNOMO**

Jabatan : **BUPATI SLEMAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian perubahan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 26 Februari 2021

Pihak Kedua


KUSTINI SRI PURNOMO

Pihak Pertama


HARIS SUTARTA, SE, MT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator RPJMD Yang Didukung	Target Sebelum Perubahan				Target Setelah Perubahan				Rumus Perhitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					(9)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Predikat LAKIP	Predikat LAKIP Kabupaten		84,5				84,5			Predikat Hasil Evaluasi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat				79				79	Jumlah Nilai IKM dari semua OPD dan UPT dibagi Jumlah OPD dan UPT
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP				WTP				Opini BPK
		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 100%
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah				27,5%				27,5%	Realisasi PAD dibagi Realisasi Pendapatan Daerah dikalikan 100 %
5	Realisasi Investasi pada BUMD	Realisasi Investasi pada BUMD	Realisasi Investasi pada BUMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Realisasi Investasi BUMD dibagi Jumlah Rencana Investasi BUMD dikali 100 %

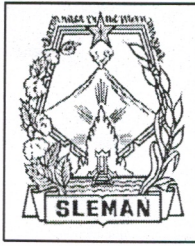
Program

Anggaran

Keterangan

1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97,295,240,813
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	349,161,763,382
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5,293,194,980
4	Pengelolaan Pendapatan Daerah	13,449,696,375





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **HARIS SUTARTA SE, MT**
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSTINI SRI PURNOMO**
Jabatan : **BUPATI SLEMAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

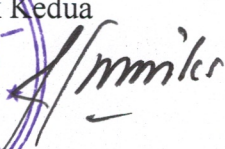
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja perubahan kedua tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perubahan kedua tersebut menjadi tanggung jawab kami.

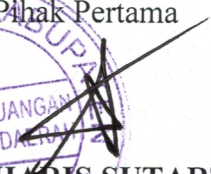
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian kinerja perubahan kedua ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 01 Oktober 2021

Pihak Kedua


KUSTINI SRI PURNOMO

Pihak Pertama


HARIS SUTARTA SE, MT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2021
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator RPJMD Yang Didukung	Target Sebelum Perubahan Kedua				Target Setelah Perubahan Kedua				Rumus Perhitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Predikat LAKIP	Predikat LAKIP	-	84,5	-	-	-	-	-	-	Predikat Hasil Evaluasi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	-	-	-	79	-	-	-	81	Jumlah Nilai IKM dari semua OPD dan UPT dibagi Jumlah OPD dan UPT
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	-	-	-	-	-	-	Opini BPK
		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	Jumlah Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 100%
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	-	-	27,5%	-	-	-	-	Realisasi PAD dibagi Realisasi Pendapatan Daerah dikalikan 100 %
5	Realisasi Investasi pada BUMD	Realisasi Investasi pada BUMD	Realisasi Investasi pada BUMD	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	Jumlah Realisasi Investasi BUMD dibagi Jumlah Rencana Investasi BUMD dikali 100 %
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat LAKIP	Predikat LAKIP	-	-	-	-	-	-	-	A	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB
7	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	-	-	-	-	B	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten

Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	69,726,155,857.00	84,300,077,703.00	
2 Pengelolaan Keuangan Daerah	322,460,101,819.00	360,209,991,240.00	
3 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5,566,934,060.00	5,591,064,980.00	
4 Pengelolaan Pendapatan Daerah	17,862,125,950.00	13,449,696,375.00	

